



**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA MAKASSAR**

**RENSTRA  
TAHUN 2021-2026**



**RENSTRA  
TAHUN 2021-2026**

**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA MAKASSAR**



WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR :55 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
35. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);

36. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Makassar.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode rencana 5 (lima) tahun yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran berhubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan
19. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian keluaran, hasil, dan dampak.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini sebagai pedoman untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Makassar.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan :
  - a. untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun rancangan awal renja perangkat daerah;
  - b. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel;
  - c. untuk menciptakan mekanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

## BAB III DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah terdiri atas :
  - a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum;
  - d. Dinas Pemadam Kebakaran;
  - e. Dinas Perpustakaan;
  - f. Dinas Kearsipan;
  - g. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - h. Dinas Kebudayaan;
  - i. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - j. Dinas Ketahanan Pangan;
  - k. Dinas Pariwisata;
  - l. Dinas Sosial;

- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Dinas Penataan Ruang;
- p. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- q. Dinas Perhubungan;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- t. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- u. Dinas Ketenagakerjaan;
- v. Dinas Perikanan dan Pertanian;
- w. Dinas Perdagangan;
- x. Dinas Lingkungan Hidup;
- y. Dinas Pertanahan;
- z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- bb. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- cc. Badan Pendapatan Daerah;
- dd. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ff. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- gg. Satuan Polisi Pamong Praja;
- hh. Inspektorat Daerah;
- ii. Sekretariat DPRD;
- jj. Sekretariat Daerah;
- kk. Kecamatan Makassar;
- ll. Kecamatan Tamalate;
- mm. Kecamatan Manggala;
- nn. Kecamatan Rappocini;
- oo. Kecamatan Mariso;
- pp. Kecamatan Biringkanaya;
- qq. Kecamatan Ujung Tanah;
- rr. Kecamatan Ujung Pandang;
- ss. Kecamatan Wajo;
- tt. Kecamatan Tallo;
- uu. Kecamatan Bontoala;
- vv. Kecamatan Tamalanrea;
- ww. Kecamatan Panakkukang;
- xx. Kecamatan Mamajang; dan
- yy. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

(2) Sistematika Dokumen Renstra Perangkat Daerah terdiri atas :

- BAB I PENDAHULUAN;
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- BAB VIII PENUTUP.

(2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
PELAPORAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan, realisasi anggaran dan indikator kinerja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang berkenaan.

BAB V  
PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila :

- a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau;
- e. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 28 SEPTEMBER 2021



WALIKOTA MAKASSAR,

*[Signature]*  
MOL. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



*[Signature]*  
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 55



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Makassar 2021-2026

Penyusunan Renstra ini dalam rangka tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 -2026 yang merupakan suatu dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dan juga untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kota Makassar dalam mencapai Visi dan Misi Walikota Makassar.

Selanjutnya renstra ini, akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu 2021-2026. Sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati dapat tercapai selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih, semoga dengan adanya dokumen Renstra ini pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan yang



menjadi Urusan dan kewenangan Sekretariat Kota Makassar dapat lebih terarah dan berkualitas serta bermanfaat bagi pembangunan Kota Makassar.

Makassar, 28 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**



**Ir.M.Ansar, MSi**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19630517 199203 1 004



## DAFTAR ISI

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II    GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH .....	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah .....	9
2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah .....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah .....	22
2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah.....	37
BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....	41
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah.....	41
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih .....	43
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi.....	47
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian	



	Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	49
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	50
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN .....	52
	4.1. Tujuan dan Sasaran .....	52
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	55
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	55
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	57
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	76
BAB VIII	PENUTUP .....	77



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan.....	16
Tabel 2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Makassar, menurut Pangkat/Golongan.....	
Tabel 3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Makassar, menurut jenis kelamin.....	17 18
Tabel 4	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Makassar.....	23
Tabel 5	Anggaran dan Realisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2015 – 2019.....	24
Tabel 6	Analisis SWOT Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Makassar.....	37
Tabel 7	Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Makassar.....	42
Tabel 8	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Makassar terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	47
Tabel 9	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota Berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	48
Tabel 10	Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal).....	51
Tabel 11	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Makassar.....	53





Tabel 12 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Makassar.....	55
Tabel 13 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kota Makassar.....	62
Tabel 14 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	76



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD sendiri merupakan Penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang secara teknis dijabarkan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Makassar TA. 2021 - 2026. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun disertai dengan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Atas dasar tersebut dan sebagai tindak lanjut dari penjabaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar tahun 2021-2026 yang berisikan visi misi dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah olehnya itu Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Makassar dimana secara khusus tugas pokok yang diemban Sekretariat Daerah adalah : *Membantu Walikota dalam*



*penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.*

Program kerja dan kegiatan yang dijabarkan dalam Dokumen Rencana Strategis ini didasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta isu-isu strategis yang berkembang sebagai dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Makassar.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Makassar TA. 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
8. Peraturan Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Makassar.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -3708 Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005 – 2025 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005 – 2025.
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015 – 2034.
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026.
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Makassar tahun 2021-2026 adalah:

#### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis ini diantaranya :

- a. untuk menunjang terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan oleh Walikota Makassar Tahun 2021-2026,
- b. Sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja Bagian lingkup Sekretariat Kota Makassar dalam menjabarkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah



ditetapkan dalam RPJMD Kota Makassar TA.2021-2026 lima tahun mendatang.

## **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Makassar tahun 2021-2026 adalah:

- a) Sebagai pedoman Unit Kerja Bagian dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Makassar setiap tahunnya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2021- 2026.
- b) Menjadi tolok ukur penilaian kinerja dan evaluasi dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggungjawab Sekretariat Daerah dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Walikota Makassar.
- c) Menetapkan prioritas program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya dan indikator kinerja yang strategis selama lima tahun, dalam dokumen resmi dan menjadi rujukan setiap tahun dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Kota Makassar Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **Bab I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur



tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Sekretariat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renstra Sekretariat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

## **Bab II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Sekretariat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Sekretariat Daerah ini.

### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah**

Memuat Penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Sekretariat Daerah, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Sekretaris Daerah untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Sekretariat Daerah.

### **2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset / modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah**



Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran / target Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan / atau indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian dan Lembaga dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi - Selatan, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

### **Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah.**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah Terpilih.**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

#### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Provinsi**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Sekretariat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian dan Lembaga ataupun Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian**





### **Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Sekretariat Daerah Kota Makassar yang memengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Makassar ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

#### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Sekretariat Daerah yang memengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah.

## **Bab IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pertanyaan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah.

## **Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang.

## **Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat Daerah.

## **Bab VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **Bab VIII PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH**

Sekretariat Daerah Kota Makassar merupakan institusi Pemerintah Kota Makassar yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Makassar.

Sekretariat Daerah Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah Kota Makassar mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar yang dijabarkan dengan peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2019, Sekretariat Daerah Kota Makassar mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian Penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPD;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administrasi dan pembinaan ASN pada instansi daerah daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar yang dijabarkan dengan peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota



Makassar merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Makassar, didukung oleh unit kerja yang mempunyai tugas :

1. Asisten Bidang Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mempunyai tugas membantu Sekretaris daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Kerjasama. Asisten Bidang Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat membawahi bagian-bagian, yaitu:
  - a. Bagian Tata Pemerintahan, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah.
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.
  - c. Bagian Hukum, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.
  - d. Bagian Kerjasama, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama.



2. Asisten Bidang Perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemberdayaan masyarakat. Asisten Bidang Perekonomian dan pembangunan membawahi bagian-bagian, yaitu:
  - a. Bagian Perekonomian, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, serta perencanaan dan pengewasan ekonomi mikro kecil.
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan administrasi bantuan pembangunan daerah baik oleh Pemerintah maupun swasta.
  - c. Bagian Pengadaan Barang/jasa, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
  - d. Bagian Pemberdayaan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan dan pelayanan administratif di bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Asisten Bidang administrasi umum mempunyai tugas membantu Sekretaris daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, penoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan



kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol, perencanaan dan keuangan.

Asisten Bidang administrasi umum membawahi bagian-bagian, yaitu:

- a. Bagian Organisasi, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan dan pelayanan administratif di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, reformasi birokrasi dan kinerja.
- b. Bagian Umum, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, sekretariat daerah dan staf ahli, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- c. Bagian Protokol, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengaturan acara, perjalanan dinas dan akomodasi, komunikasi dan dokumentasi peminann.
- d. Bagian Perencanaan dan keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan perangkat daerah, susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, meliputi :
  - 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas :
    - a. Subbagian Administrasi Pemerintahan;
    - b. Subbagian Administrasi Kewilayahan;
    - c. Subbagian Otonomi Daerah.
  - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
    - a. Subbagian Bina Mental Spiritual;



- b. Subbagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
  - d. Subbagian Kesejahteraan Rakyat non Pelayanan Dasar.
- 3) Bagian Hukum, terdiri atas :
- a. Subbagian Perundang-undangan;
  - b. Subbagian Bantuan Hukum;
  - c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
- 4) Bagian Kerjasama, terdiri atas :
- a. Subbagian Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri;
  - b. Subbagian Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri;
  - c. Subbagian Evaluasi Kerjasama.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, meliputi:
- 1) Bagian Perekonomian, terdiri atas:
- a. Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. Subbagian Pengendalian dan distribusi perekonomian;
  - c. Subbagian Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
- 2) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
- a. Subbagian Penyusunan Program;
  - b. Subbagian Pengendalian Program;
  - c. Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Bagian Pengadaan Barang/jasa, terdiri atas :
- a. Subbagian Pengelolaan Pengadaan barang/ jasa;
  - b. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik;
  - c. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa.
- 4) Bagian Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
- a. Subbagian Pengembangan Potensi wilayah;
  - b. Subbagian Kelembagaan Keswadayaan;
  - c. Subbagian Pemberdayaan Ekonomi.
- d. Asisten Administrasi Umum, Meliputi:
- 1) Bagian Organisasi, terdiri atas:

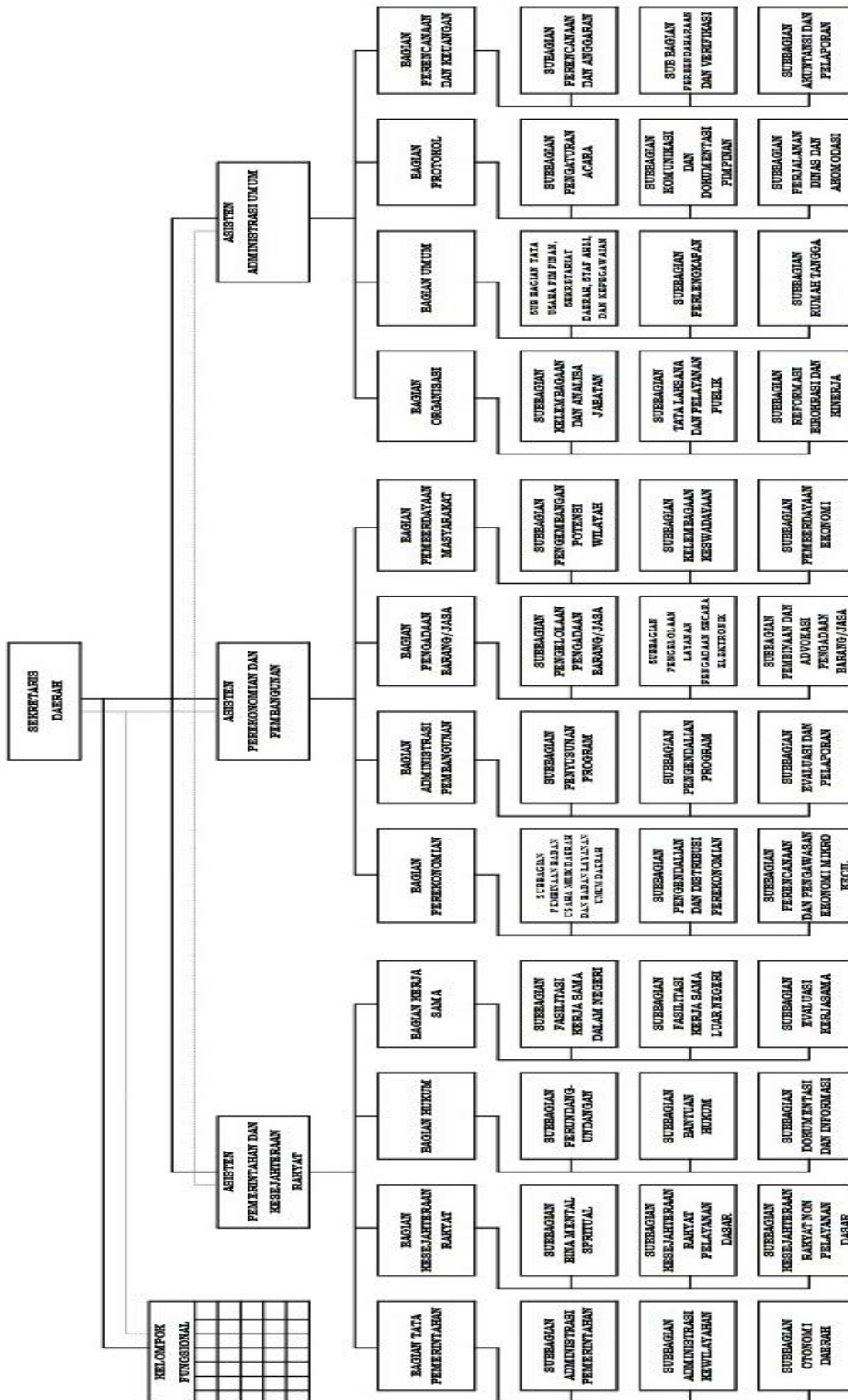


- a. Subbagian Kelembagaan dan analisis jabatan;
  - b. Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik;
  - c. Subbagian Reformasi Birokrasi dan Kinerja
- 2) Bagian Umum, terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha pimpinan, Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Perlengkapan;
  - c. Subbagian Rumah Tangga.
- 3) Bagian Protokol, terdiri atas:
- a. Subbagian Pengaturan Acara;
  - b. Subbagian Perjalanan Dinas dan Akomodasi;
  - c. Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan.
- 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan dan anggaran;
  - b. Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi;
  - c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar lebih jelas dapat dilihat pada bagan struktur sebagai berikut:



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**







## 2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kota Makassar, diperlukan sumber daya manusia dan sarana/perlengkapan kantor yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Adapun sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

### a. Tingkat Pendidikan

Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang dimiliki atau pengalaman dalam bekerja. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat jumlah pegawai pada Setda Kota Makassar dengan klasifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan**

NO	BAGIAN	JML	TINGKAT PENDIDIKAN						
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3
1	Tata Pemerintahan	12			1		5	6	
2	Adm. Pembangunan	16			3	1	11	1	
3	Hukum	17			1		10	5	1
4	Organisasi	9					6	3	
5	Perekonomian	8					4	2	2
6	Kerjasama	5					3	2	
7	Kesejahteraan Rakyat	11					7	4	
8	Perencanaan dan Keuangan	12				1	7	4	
9	Umum	80	1	3	30	1	24	20	1
10	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	39			1	2	22	13	1
11	Pemberdayaan Masyarakat	13			3		6	4	
12	Protokol	24			4		16	4	
Total Jumlah		246	1	3	43	5	121	68	5

Berdasarkan table diatas jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah per Agustus 2021 sebanyak 246 Orang dengan tingkat Pendidikan yang terbagi atas S-3 sebanyak 5 Orang, S-2 sebanyak 68 Orang, S-1 sebanyak 121 Orang, D3 sebanyak 5 Orang, SLTA sebanyak 43 Orang, SLTP sebanyak 3 Orang dan terakhir SD sebanyak 1 Orang. Jumlah ASN dengan Tingkat Pendidikan ini tersebar pada 12 Bagian Unit Kerja Sekretariat Daerah.



**b. Jumlah Pegawai dilihat dari golongan ruang**

Selain tingkat Pendidikan sumber daya Sekretariat Daerah juga dapat digolongkan berdasarkan tingkat Golongan Ruang ASN. Adapun sebaran ASN berdasarkan Tingkat Golongan ruang digambarkan pada table dibawah ini:

**Tabel 2.**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah**  
**Kota Makassar, Menurut Pangkat/Golongan.**

NO	BAGIAN	PANGKAT/GOL				JUMLAH PNS	JUMLAH PTT
		I	II	III	IV		
1	Tata Pemerintahan	0	1	5	6	12	12
2	Adm. Pembangunan	0	3	11	2	16	15
3	Hukum	0	1	14	2	17	14
4	Organisasi	0	0	6	3	9	9
5	Perekonomian	0	0	7	1	8	10
6	Kerjasama	0	0	4	1	5	10
7	Kesejahteraan Rakyat	0	0	8	3	11	27
8	Perencanaan dan Keuangan	0	0	9	3	12	12
9	Umum	5	29	25	21	80	296
10	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	0	3	29	7	39	12
11	Pemberdayaan Masyarakat	0	4	7	2	13	15
12	Protokol	1	4	16	3	24	88
Total Jumlah		6	45	141	54	246	520

Dari tabel diatas diperoleh gambaran jumlah pegawai Sekretariat Daerah per Bulan Agustus 2021 dengan rincian PNS sebanyak 246 Orang, Non PNS sebanyak 520 Orang. Pegawai dengan Jumlah sebanyak 246 terdiri atas 54 Orang Pegawai Golongan IV, 141 Orang Pegawai golongan III, 45 Orang Pegawai Golongan II dan 6 Orang Pegawai Golongan I.

**c. Jumlah Pegawai dilihat dari jenis kelamin**

Sumber daya manusia dari perspektif gender yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah juga dapat di kategorikan sebagai potensi. Adapun Sebaran Pegawai menurut jenis kelamin digambarkan sebagai berikut:



**Tabel 3.**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Makassar,**  
**Menurut Jenis Kelamin.**

NO	BAGIAN	JUMLAH PNS		JUMLAH PTT	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Tata Pemerintahan	10	2	5	7
2	Adm. Pembangunan	7	9	10	5
3	Hukum	8	9	10	4
4	Organisasi	7	2	4	5
5	Perekonomian	7	1	5	5
6	Kerjasama	1	4	3	7
7	Kesejahteraan Rakyat	4	7	14	13
8	Perencanaan dan Keuangan	5	7	3	9
9	Umum	61	20	166	130
10	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	19	20	4	8
11	Pemberdayaan Masyarakat	6	7	6	9
12	Protokol	11	13	58	30
Total Jumlah		146	101	288	232

Dari Tabel diatas digambarkan bahwa terdapat 146 ASN laki – laki dan 288 Pegawai Non PNS Laki – laki dan 101 ASN berjenis kelamin perempuan dan 232 Pegawai Non PNS berjenis kelamin Perempuan yang tersebar pada 12 Bagian Unit Kerja Sekretariat Daerah.

#### **d. Sarana dan Prasarana**

Dalam rangka menunjang kinerja Sekretariat Daerah selain Sumber daya manusia maka Sekretariat Daerah Kota Makassar juga ditunjang dengan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki dalam melaksanakan pelayanan tugas dan fungsinya. Adapun fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki dapat digambarkan dalam table dibawah ini:



**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2021-2026**

NO.	INVENTARIS		UNIT KERJA LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR												JUMLAH
	KODE BARANG	URAIAN	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN HUKUM	BAGIAN KERJASAMA	BAGIAN PEREKONOMIAN	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BAGIAN ORGANISASI	BAGIAN UMUM	BAGIAN PROTOKOL	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15
1	1.3.2.02.01.01.003	Station Wagon	6	6	7	4	8	38	5	6	-	156	20	6	262
2	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	-	1	-	-	-	1	-	-	6	6	1	-	15
3	1.3.2.02.01.03.002	Pick Up	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3
4	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	4	12	13	8	18	58	3	6	5	287	46	23	483
5	1.3.2.02.01.06.110	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	6
6	1.3.2.02.02.01.009	Baggage Trolley	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	-	-	7
7	1.3.2.02.02.01.010	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
8	1.3.2.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	5
9	1.3.2.05.01.01.003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
10	1.3.2.05.01.01.004	Mesin Ketik Listrik	1	-	1	1	-	1	-	6	2	1	1	1	15
11	1.3.2.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
12	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	-	8	13	6	4	8	2	32	7	52	1	23	156
13	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	-	-	-	2	16	2	-	-	4	47	16	9	96
14	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	-	-	-	-	-	9	1	-	4	37	-	-	51
15	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	1	5	2	7	3	2	1	12	2	22	4	6	67
16	1.3.2.05.01.04.007	Brandias	1	1	1	1	1	4	1	1	1	3	1	1	17
17	1.3.2.05.01.04.022	Folding Container Box	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	5
18	1.3.2.05.01.04.027	Lemari Kaca	-	-	2	3	1	-	-	-	-	13	-	-	19
19	1.3.2.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	-	-	-	-	-	6	1	1	-	123	-	-	131
20	1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
21	1.3.2.05.01.05.005	White Board	-	-	1	-	1	-	-	3	-	9	-	-	14
22	1.3.2.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	1	-	2	-	1	1	-	2	2	7	1	3	20
23	1.3.2.05.01.05.040	Penangkal Petir	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
24	1.3.2.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	-	1	1	1	1	8	-	2	1	21	1	1	38
25	1.3.2.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
26	1.3.2.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	-	-	-	-	14	3	1	-	-	2	-	-	20
27	1.3.2.05.01.05.089	Layar Projector/Infocus	-	-	1	-	-	6	-	3	1	20	-	-	31
28	1.3.2.05.01.05.093	Papan Data	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-	12
29	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	13	9	9	16	20	11	12	4	16	132	15	5	262
30	1.3.2.05.02.01.008	Meja Rapat	-	1	1	-	1	3	1	3	2	31	-	2	45
31	1.3.2.05.02.01.012	Meja Telepon	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
32	1.3.2.05.02.01.014	Meja Resepsionis	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3
33	1.3.2.05.02.01.016	Meja Tambahan	-	-	-	-	-	1	-	-	1	34	-	-	36
34	1.3.2.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	90	-	125
35	1.3.2.05.02.01.028	Meja Makan Kayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	18	-	106
36	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	35	12	12	25	10	26	22	28	28	2.095	12	16	2.321
37	1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu	1	1	1	-	-	2	-	-	1	38	7	-	51
38	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	8	-	100
39	1.3.2.05.02.01.038	Meja Cetakan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	4
40	1.3.2.05.02.01.039	Meja Komputer	-	-	4	-	-	2	-	-	-	5	-	-	11



**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2021-2026**

NO.	INVENTARIS		UNIT KERJA LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR												JUMLAH
	KODE BARANG	URAIAN	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN HUKUM	BAGIAN KERJASAMA	BAGIAN PEREKONOMIAN	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BAGIAN ORGANISASI	BAGIAN UMUM	BAGIAN PROTOKOL	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15
41	1.3.2.05.02.01.041	Partisi	-	-	-	-	-	4	-	-	-	17	-	-	21
42	1.3.2.05.02.01.048	Sofa	1	1	1	-	3	2	2	2	1	50	7	2	72
43	1.3.2.05.02.01.054	Meja Biro	-	24	16	-	-	-	-	44	1	2	-	17	104
44	1.3.2.05.02.01.055	Meubelair Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
45	1.3.2.05.02.02.001	Jam Mekanis	-	-	-	-	-	2	-	-	-	20	18	-	40
46	1.3.2.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	-	-	-	-	-	1	-	-	-	16	1	-	18
47	1.3.2.05.02.03.004	Mesin Cuci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	7
48	1.3.2.05.02.03.008	Alat Pembersih lainnya	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	6
49	1.3.2.05.02.04.001	Lemari Es	1	-	1	2	2	3	2	-	1	50	3	2	67
50	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	2	5	8	6	10	13	11	14	7	200	30	7	313
51	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	-	-	-	-	-	2	-	-	-	22	-	-	24
52	1.3.2.05.02.04.007	Exhause Fan	-	-	2	-	-	3	-	-	-	28	1	-	34
53	1.3.2.05.02.05.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	30	1	-	32
54	1.3.2.05.02.05.004	Teko Listrik	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
55	1.3.2.05.02.05.019	Mixer	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	8
56	1.3.2.05.02.05.027	Alat Dapur Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	1	-	10
57	1.3.2.05.02.06.002	Televisi	2	-	2	1	3	8	2	1	3	95	18	3	138
58	1.3.2.05.02.06.006	Equalizer	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10	-	-	11
59	1.3.2.05.02.06.007	Loudspeaker	-	-	-	-	-	7	-	-	-	74	-	-	81
60	1.3.2.05.02.06.008	Sound System	-	-	-	-	-	2	-	1	-	41	-	-	44
61	1.3.2.05.02.06.012	Wireless	1	-	1	1	4	5	-	1	1	4	1	-	19
62	1.3.2.05.02.06.014	Microphone	-	-	-	-	-	1	-	2	-	8	-	-	11
63	1.3.2.05.02.06.015	Microphone Floor Stand	-	-	-	-	-	10	-	-	-	63	-	-	73
64	1.3.2.05.02.06.018	Unit Power Supply	2	6	7	1	2	23	16	4	3	32	2	9	107
65	1.3.2.05.02.06.028	Lambang Garuda Pancasila	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3
66	1.3.2.05.02.06.034	Seterika	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	5
67	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	-	-	-	1	1	8	2	1	2	73	3	3	94
68	1.3.2.05.02.06.047	Coffee Maker	-	-	-	-	-	1	-	-	-	17	-	-	18
69	1.3.2.05.02.06.048	Handy Cam	-	1	-	1	6	14	-	2	-	-	1	2	27
70	1.3.2.05.02.06.068	Tangga	-	1	1	1	2	4	3	-	-	30	1	1	44
71	1.3.2.05.02.06.074	Bracket Standing Peralatan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
72	1.3.2.05.02.06.076	Home Theater	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
73	1.3.2.05.02.06.077	Pompa Air Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
74	1.3.2.05.02.06.078	Alat Rumah Tangga Lainnya	-	-	-	-	-	14	-	6	-	6378	113	-	6511
75	1.3.2.05.02.07.001	Alat Pemadam/Portable	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
76	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
77	1.3.2.05.03.02.011	Meja Tamu Biasa	-	-	-	-	1	-	-	-	-	38	2	-	41
78	1.3.2.05.03.03.009	Kursi Kerja	3	29	31	16	30	31	36	29	19	218	12	20	474
79	1.3.2.05.03.03.010	Kursi Pimpinan	4	4	4	5	3	6	1	5	5	85	2	5	129
80	1.3.2.05.03.05.005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2



**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2021-2026**

NO.	INVENTARIS		UNIT KERJA LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR												JUMLAH
	KODE BARANG	URAIAN	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN HUKUM	BAGIAN KERJASAMA	BAGIAN PEREKONOMIAN	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BAGIAN ORGANISASI	BAGIAN UMUM	BAGIAN PROTOKOL	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15
81	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10	2	13	3	-	13	7	-	-	41	5	-	94
82	1.3.2.06.01.01.026	Audio Filter	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
83	1.3.2.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	-	-	-	-	-	9	-	-	-	26	-	-	35
84	1.3.2.06.01.01.040	Power Supply Microphone	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7
85	1.3.2.06.01.01.059	Power Amplifier	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
86	1.3.2.06.01.01.070	Receiver VHF/FM	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	23
87	1.3.2.06.01.01.078	Microphone Cable	-	-	-	-	-	5	-	-	-	123	-	-	128
88	1.3.2.06.01.01.084	Cable	-	-	-	-	-	1	-	-	-	20	-	-	21
89	1.3.2.06.01.01.087	Voice Recorder	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	5
90	1.3.2.06.01.01.090	Digital LED Running Text	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	4
91	1.3.2.06.01.01.096	Peralatan Studio Audio Lainnya	-	-	-	-	-	2	1	-	-	116	-	-	119
92	1.3.2.06.01.02.003	Camera Electronic	-	2	-	1	12	31	-	-	-	10	-	-	56
93	1.3.2.06.01.02.045	Tripod Camera	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	6
94	1.3.2.06.01.02.061	Lensa Kamera	-	-	-	-	16	5	-	-	-	5	-	-	26
95	1.3.2.06.01.02.116	Head Set	-	-	-	-	-	25	-	-	-	1	-	-	26
96	1.3.2.06.01.02.126	Camera Digital	-	-	2	-	2	3	-	2	3	4	-	-	16
97	1.3.2.06.01.02.128	Lampu Blitz Kamera	-	-	-	-	10	3	-	-	-	2	-	-	15
98	1.3.2.06.01.02.164	Peralatan Studio Video Lainnya	-	-	-	-	5	1	-	-	-	2	-	-	8
99	1.3.2.06.01.04.031	Mesin Potong	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
100	1.3.2.06.01.04.052	Mesin Pembuat ID Card	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
101	1.3.2.06.01.05.038	GPS Receiver	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
102	1.3.2.06.02.01.003	Pesawat Telephone	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	4
103	1.3.2.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	-	-	-	8	6	52	1	4	-	98	20	-	189
104	1.3.2.06.02.01.010	Facsimile	-	-	-	-	1	2	-	1	-	3	1	-	8
105	1.3.2.06.02.02.004	Alat Komunikasi Radio SSB Lainnya	-	-	-	-	-	2	-	-	-	15	-	-	17
106	1.3.2.06.02.08.047	Alat Komunikasi Lainnya	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
107	1.3.2.06.03.47.002	Genset	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	4
108	1.3.2.08.01.11.125	Tripod	-	-	-	-	-	3	-	2	-	5	-	-	10
109	1.3.2.08.01.52.009	Transmitter	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
110	1.3.2.08.03.10.004	Orgen/Electrone	-	-	-	-	-	4	-	-	-	6	-	-	10
111	1.3.2.08.03.12.001	Lambang Negara (Garuda)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
112	1.3.2.10.01.01.001	Mainframe (Komputer Jaringan)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
113	1.3.2.10.01.01.008	Komputer Jaringan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
114	1.3.2.10.01.02.001	PC Unit	16	12	32	18	28	51	22	18	23	129	14	26	389
115	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	5	3	10	2	9	83	16	5	6	34	8	11	192
116	1.3.2.10.01.02.009	Tablet PC	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	3
117	1.3.2.10.02.01.012	Hard Disk	-	-	6	-	1	26	21	-	-	8	-	6	68
118	1.3.2.10.02.02.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
119	1.3.2.10.02.02.017	Peralatan Mini Komputer Lainnya	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
120	1.3.2.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	-	-	-	-	1	3	-	-	-	3	1	-	8
121	1.3.2.10.02.03.002	Monitor	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4	1	-	8
122	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	9	29	12	17	41	16	8	15	113	13	28	309
123	1.3.2.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	-	1	1	-	6	2	-	2	6	1	3	23
124	1.3.2.10.02.04.001	Server	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4
125	1.3.2.10.02.04.002	Router	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
126	1.3.2.10.02.04.008	rack Modem	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
127	1.3.2.10.02.04.034	Peralatan Jaringan	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
128	1.3.3.01.01.01.006	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	4
129	1.3.3.01.01.25.005	Pagar Kantor	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
<b>JUMLAH</b>			<b>119</b>	<b>157</b>	<b>239</b>	<b>154</b>	<b>282</b>	<b>806</b>	<b>218</b>	<b>277</b>	<b>188</b>	<b>11.798</b>	<b>526</b>	<b>242</b>	<b>15.006</b>



Sarana dan prasarana berupa barang inventaris dan asset yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagaimana di gambarkan dalam table diatas tersebar pada 12 Bagian/ Unit Kerja dan diharapkan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat daerah. Dengan pemenuhan barang inventaris yang terus dilakukan pembaruan dapat dilihat kondisi masing – masing unit kerja untuk nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melihat kondisi internal Sekretariat Daerah Kota Makassar.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah**

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Makassar dinilai melalui pengukuran kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan sebelumnya secara berjenjang mulai dari masukan, keluaran dan hasil, serta analisis pencapaian kinerja yang mengacu kepada perencanaan stratejik yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan-kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dilakukan dengan melakukan perbandingan sejauhmana target indikator Sasaran Rencana Startegis Sekretariat Daerah TA. 2015 - 2019 dapat terpenuhi. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam Perjalanannya beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen penetapan kinerja mengalami perubahan target kinerja.

Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran. Penetapan indikator-indikator ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Adapun Sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.



2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
3. Tertibnya Penataan Produk Hukum Daerah
4. Terlayannya Bantuan Hukum dan HAM Bagi Masyarakat
5. Tertatanya organisasi perangkat daerah yang dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan
6. Tertibnya administrasi pembangunan
7. Tertibnya administrasi penyelenggaraan kerjasama pemerintah daerah
8. Tertibnya pengelolaan administrasi perkantoran
9. Tertatanya ketatalaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public
10. Terwujudnya nilai – nilai agama dalam kehidupan sehari – hari
11. Meningkatnya kualitas Materi dan penyebaran informasi
12. Meningkatnya partisipasi Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Capaian Target Kinerja Sekretariat Daerah Kota Makassar dapat digambarkan dalam table dibawah ini :

**Tabel 4**  
**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penilaian LPPD, ILPPD dan EKPPD				Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Peringkat 10 Besar Nasional	Peringkat 10 Besar Nasional	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Peringkat 10 Besar Nasional	Peringkat 10 Besar Nasional	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Peringkat 10 Besar Nasional	Peringkat 10 Besar Nasional
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan				50%	50%	66%	80%	93,33%	55,69%	71,42%	71,42%	80%	93,33%	111,38%	142,84%	108,21%	100%	100,00%
3.	Persentase legal drafting yang diselesaikan				100%	100%	100%	100%	100%	90,50%	90,50%	86,99%	73,74%	86,67%	90,50%	90,50%	86,99%	74%	86,67%
4.	Cakupan pelayanan bantuan hukum bagi warga				10%	10%	10%	100%	100%	22,70%	10,52%	12,82%	100%	100%	227,00%	105,20%	128,20%	100%	100,00%
5.	Persentase organisasi perangkat daerah yang dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
6.	Persentase jumlah pengadaan barang/jasa secara elektronik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
7.	Persentase hasil kerjasama yang terselenggara				82%	84%	80%	88%	90%	91,3%	100%	100%	87,50%	189,79%	111,34%	119,05%	125,00%	99%	210,88%
8.	Cakupan dukungan pelayanan administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
9.	Persentase SKPD yang mempunyai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
10.	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi				Peringkat I	Peringkat I	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan	Peringkat II	Peringkat II	Peringkat II	11 kegiatan	11 kegiatan	Peringkat II	Peringkat II	Peringkat II	11 kegiatan	11 kegiatan
11.	Cakupan distribusi/penyebarluasan hasil-hasil kegiatan dokumentasi Pemerintah Kota				70%	70%	100%	100%	100%	86,9%	44,12%	44,12%	99,42%	99,42%	124,14%	63,03%	44,12%	99%	99,42%
12.	Cakupan peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan				15,70%	19,70%	53%	100%	100%	-	-	100%	88,23%	76,40%	0,00%	0,00%	188,68%	88%	76,40%





Untuk mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah maka berikut ini di gambarkan Anggaran dan Realisasi Layanan Sekretariat Daerah melalui pelaksanaan Renstra 2014 – 2019 sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Anggaran dan Realisasi Layanan Sekretariat Daerah**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- , (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (Rp)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
Belanja Daerah	278.318.939.000	255.684.017.900	250.316.224.657	265.843.756.863	265.921.912.000	253.198.357.275	235.388.689.676	240.403.249.349	234.960.393.655	246.932.462.190	91%	92%	96%	88%	93%	263.216.970.084	242.176.630.429
a. Belanja Tidak Langsung	10.000.000.000	18.073.037.000	18.344.213.000	18.711.307.000	20.685.650.000	10.000.000.000	17.637.659.085	17.560.788.520	18.259.067.888	19.199.088.597	100%	98%	96%	98%	93%	17.162.841.400	16.531.320.818
- Belanja Pegawai	10.000.000.000	18.073.037.000	18.344.213.000	18.711.307.000	20.685.650.000	10.000.000.000	17.637.659.085	17.560.788.520	18.259.067.888	19.199.088.597	100%	98%	96%	98%	93%	17.162.841.400	16.531.320.818
b. Belanja Langsung	268.318.939.000	237.610.980.900	231.972.011.657	247.132.449.863	245.236.262.000	243.198.357.275	217.751.030.591	222.842.460.829	216.701.325.767	227.733.373.593	91%	92%	96%	88%	93%	246.054.128.684	225.645.309.611
- Belanja Pegawai	6.341.450.000	13.698.875.000	18.056.175.000	19.085.000.000	17.881.325.000	6.305.925.019	13.461.400.000	17.580.825.000	17.054.500.000	16.280.150.000	99%	98%	97%	89%	91%	15.012.565.000	14.136.560.004
- Belanja Barang dan Jasa	128.767.669.500	129.559.596.730	146.292.420.100	154.750.572.624	147.931.075.250	123.811.306.756	119.990.076.021	138.335.866.757	131.442.498.136	133.951.534.508	96%	93%	95%	85%	91%	141.460.266.841	129.506.256.436
- Belanja Modal	133.209.819.500	94.352.509.170	67.623.416.557	73.296.877.239	79.423.861.750	113.081.125.500	84.299.554.570	66.925.769.072	68.204.327.631	77.501.689.085	85%	89%	99%	93%	98%	89.581.296.843	82.002.493.172

Berdasarkan tabel 5 di atas dengan tingkat pencapaian kinerja yang memiliki arti baik dalam menunjang pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Makassar maka secara naratif analisis pencapaian masing-masing indikator sasaran secara detail dapat jelaskan sebagai berikut:

**1. Terwujudnya pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
						Target	Realisasi	% Capaian
1.	Penilaian LPPD, ILPPD dan EKPPD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	10 Besar Nasional	10 Besar Nasional	10 Besar Nasional	100
Rata-rata pencapaian kinerja								100



Capaian sasaran terwujudnya pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diukur dari indikator penilaian LPPD, ILLPD dan EKPPD Tahun 2019 adalah masuk kategori 10 besar Nasional. Kinerja telah berhasil terealisasi 10 Besar Nasional sehingga capaian kinerja 100% atau kategori **Sangat Tinggi**.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 maka capaian kinerja Tahun 2019 tetap sebesar 100% dibanding capaian kinerja Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Capaian kinerja tersebut di atas dipengaruhi dengan keseriusan pimpinan dalam mengawal penyusunan LPPD dan ILPPD setiap tahunnya dan pencapaiannya peringkat pertama LPPD Kota Makassar tahun 2019 secara nasional.

## 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Tahun 2019		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Kecamatan/Kelurahan yang meningkat kinerja pelayanannya	55,69%	71,42%	71,42%	80%	93,33%	93,33%	100
Rata-rata pencapaian kinerja								100

Capaian sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang diukur dari indikator jumlah kecamatan/kelurahan yang meningkat kinerja pelayanannya, dengan target kinerja 93,33% (12 dari 15 kecamatan) pada tahun 2019. Kinerja telah berhasil terealisasi 93,33% sehingga capaian kinerja 100% atau kategori **Sangat Tinggi**.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 maka capaian kinerja Tahun 2019 terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian kinerja tersebut di atas dinilai dari variabel peningkatan kinerja pelayanan Kecamatan berdasarkan hasil perolehan ISO terhadap substansi pelayanan secara umum di 15 Kecamatan yang ada. Dari hasil pelaksanaan terdapat 12 Kecamatan yang telah meraih ISO.



### 3. Tertibnya Penataan Produk Hukum Daerah

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
						Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase legal drafting yang diselesaikan	90,59%	90,50%	86,99%	73,74%	100%	86,67%	86,67
Rata-rata pencapaian kinerja								86,67

Capaian sasaran tertibnya penataan produk hukum daerah yang diukur dari indikator persentase legal drafting yang diselesaikan, dengan target kinerja 100% pada tahun 2019. Kinerja telah berhasil terealisasi 86,67% sehingga capaian kinerja 86,67% atau kategori **Tinggi**.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja dari tahun ke tahun, maka capaian kinerja Tahun 2019 mengalami kenaikan 22,75% dari capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 86,67%. Program Legislasi Daerah sebanyak 25 dan Peraturan Walikota sebanyak 95. Adapun legal drafting adalah proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yang dimulai dari Perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

Menurunnya capaian kinerja tersebut di atas dipengaruhi dengan beberapa Rancangan Peraturan Daerah yang sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah belum terselesaikan pembahasannya.

### 4. Terlayannya Bantuan Hukum dan HAM bagi Masyarakat

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
						Target	Realisasi	% Capaian
1.	Cakupan pelayanan bantuan hukum bagi warga	22,7%	10,52%	12,82%	100%	100%	100%	100
Rata-rata pencapaian kinerja								100

Capaian sasaran terlayannya bantuan hukum dan HAM bagi masyarakat yang diukur dari indikator cakupan pelayanan bantuan hukum bagi warga dengan target kinerja



100% Tahun 2019. Kinerja berhasil terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100% atau kategori Sangat **Tinggi**. Hal ini terukur melalui jumlah warga miskin yang bermohon untuk di mediasi/menerima bantuan hukum berbanding dengan warga miskin yang bermohon bantuan hukum selama tahun 2019, untuk warga miskin yang bermohon ke Bagian Hukum sebanyak 33 orang yang untuk selanjutnya konsultasi dan mediasi diserahkan ke Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 46 Tahun 2017. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018, maka capaian kinerja Tahun 2019 tetap dibanding dari capaian kinerja Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebesar 100%.

Meningkatnya capaian kinerja tersebut di atas dipengaruhi dengan adanya kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang diatur dalam Peraturan Walikota Makassar, sehingga permasalahan dari warga yang mendaftar dapat memenuhi persyaratan dan dapat dimediasi untuk penyelesaiannya.

#### **5. Tertatanya Organisasi Perangkat Daerah yang dievaluasi dan disesuaikan dengan Perkembangan dan Kebutuhan**

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
						Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase organisasi perangkat daerah yang dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
Rata-rata pencapaian kinerja								100

Capaian sasaran tertatanya organisasi perangkat daerah yang dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang diukur dari persentase organisasi perangkat Daerah yang dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dengan target kinerja 100% pada tahun 2019. Kinerja telah berhasil terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100% atau kategori **Sangat Tinggi**.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018, maka capaian kinerja Tahun 2019 tetap dari capaian kinerja Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebesar 100%.



Capaian kinerja tersebut di atas dipengaruhi dengan pemberlakuan Permendagri nomor 56 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik serta pelaksanaan Permendagri No. 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dan Permenpan No. 20 Tahun Tahun 2018 tentang Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, serta capaian kinerja ini juga dipengaruhi dengan penyusunan standar analisa jabatan, standarisasi jabatan, kompetensi jabatan dan beban kerja di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai salah satu syarat pemenuhan jabatan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## 6. Tertibnya Administrasi Pembangunan Daerah

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
						Target	Realisasi	% Capaian
2.	Persentase jumlah pengadaan barang/jasa secara elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
Rata-rata pencapaian kinerja								100

Capaian sasaran tertibnya administrasi pembangunan daerah yang diukur dari persentase jumlah pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan target kinerja 100% pada tahun 2019. Kinerja telah berhasil terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100% atau kategori **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat diukur dari jumlah paket lelang pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik berbanding dengan jumlah paket lelang pengadaan barang/jasa yang ditargetkan dilakukan secara elektronik tahun 2019. Dimana capaian kinerja ini adalah jumlah paket lelang pengadaan barang dan jasa tahun 2018 sebanyak 335 paket.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja dari tahun ke tahun, maka capaian kinerja Tahun 2019 tetap dibanding dari capaian kinerja Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebesar 100%.

Capaian kinerja tersebut di atas dipengaruhi dengan terlaksananya semua paket lelang yang ada pada semua SKPD melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa.



## 7. Tertibnya Administrasi Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
						Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase hasil kerjasama yang terselenggara	91,3%	100%	100%	87,50%	90%	189,79%	210,89
Rata-rata pencapaian kinerja								210,89

Capaian sasaran tertibnya administrasi penyelenggaraan kerjasama pemerintah daerah yang diukur dari persentase hasil kerjasama yang terselenggara dengan target kinerja 90% pada tahun 2019. Kinerja telah berhasil terealisasi 189,79% sehingga capaian kinerja 210,89% atau kategori **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat diukur dari kerjasama yang dilaksanakan Pemerintah Kota berbanding dengan target kerjasama yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota tahun 2019.

Dimana capaian kinerja ini adalah jumlah kerjasama yang dilaksanakan sampai tahap MoU dan perjanjian kerjasama serta kerjasama luar Negeri sebanyak 93 berbanding dengan jumlah pernyataan kehendak kerjasama pemerintah daerah dan kerjasama investasi yang ditargetkan untuk dilaksanakan sebanyak 49.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018, maka capaian kinerja Tahun 2019 mengalami kenaikan 237% dibandingkan capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 87,50%.

Capaian kinerja tersebut di atas banyak dipengaruhi dengan adanya Mou dan PKS yang baru terlaksana pada Tahun 2019.

Presentase kerjasama antar pemerintah/lembaga yang terselenggara:

No.	Tahapan Kerja Sama	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Surat Pernyataan Kehendak/Surat Permohonan	27	34	42	34	39
2	MoU	19	28	31	15	75
3	Perjanjian Kerja Sama	6	6	9	9	10
4	Kerjasama Luar Negeri	-	-	2	-	1



Presentase kerjasama investasi yang terselenggara:

No.	Tahapan Kerja Sama	Tahun				
		2014	2015	2016	2018	2019
1.	Surat Permohonan	-	-	-	-	10
2.	MoU	11	11	4	6	6
3.	Perjanjian Kerja Sama	2	2	2	2	1

## 8. Tertibnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
						Target	Realisasi	% Capaian
1.	Cakupan dukungan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
Rata-rata pencapaian kinerja								100

Capaian sasaran tertibnya pengelolaan administrasi perkantoran yang diukur dari cakupan dukungan pelayanan administrasi perkantoran dengan target kinerja 100% pada tahun 2019. Kinerja telah berhasil terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100% atau kategori **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat diukur dari jumlah bulan terlaksananya kegiatan dengan capaian jumlah bulan yang ditargetkan untuk pelaksanaan kegiatan.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018, maka capaian kinerja Tahun 2019 tetap dibanding dari capaian kinerja Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebesar 100%.

Capaian kinerja tersebut di atas dipengaruhi dengan terlaksananya administrasi perkantoran yang dilaksanakan pada Bagian Umum, Bagian Perlengkapan, Bagian Keuangan, Bagian Protokol dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana lingkup Sekretariat Daerah.



## 9. Tertatanya Ketatalaksanaan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
						Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase SKPD yang telah menerapkan sistem manajemen mutu (ISO)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100
Rata-rata pencapaian kinerja								100

Capaian sasaran tertatanya ketatalaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang diukur dari persentase SKPD yang telah menerapkan sistem manajemen mutu (ISO) dengan target kinerja 10% pada tahun 2019. Kinerja telah berhasil terealisasi 10% sehingga capaian kinerja 100% atau kategori **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat diukur dari jumlah SKPD yang menerapkan sistem manajemen mutu (ISO) dibanding dengan jumlah SKPD yang ditargetkan untuk menerapkan sistem manajemen mutu (ISO). Suatu SKPD dikatakan menerapkan ISO bila memenuhi variabel: 1) memiliki standar operasional prosedur 2) standar pelayanan 3) mutu pelayanan 4) maklumat pelayanan 5) pengaduan masyarakat 6) memiliki loket pelayanan 7) administrasi pengarsipan.

Dimana capaian kinerja ini adalah sebanyak 1 SKPD yang menerapkan sistem manajemen mutu (ISO) Tahun 2019 dibanding dengan jumlah SKPD yang ditargetkan untuk menerapkan sistem manajemen mutu (ISO) sebanyak 10 SKPD.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja dari tahun ke tahun, maka capaian kinerja Tahun 2019 tetap dibanding dari capaian kinerja Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebesar 100%.

Capaian kinerja tersebut di atas dipengaruhi dengan komitmen kepala SKPD untuk menerapkan sistem manajemen mutu (ISO) dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaannya.





## 10. Terwujudnya Nili-Nilai Agama dalam Kehidupan Sehari-Hari

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
						Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	Peringkat I	Peringkat II	Peringkat II	11 Kegiatan	25 Kegiatan	11 Kegiatan	44
Rata-rata pencapaian kinerja								44

Capaian sasaran terwujudnya nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari yang diukur dari jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi dengan target kinerja 25 kegiatan pada tahun 2019. Kinerja telah berhasil terealisasi 11 kegiatan sehingga capaian kinerja 44% atau kategori **Rendah**. Hal ini dapat diukur dari jumlah kegiatan keagamaan yang ditargetkan pada Rencana Kerja Tahun 2019 adalah 25 kegiatan dan yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah 14 kegiatan dan yang terlaksana 11 kegiatan.

Dimana capaian kinerja ini adalah sebanyak 11 kegiatan dan yang tidak terlaksana 3 kegiatan. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja dari tahun ke tahun, maka capaian kinerja Tahun 2019 tetap dibanding dari capaian kinerja Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebesar 80%.

Capaian kinerja tersebut di atas dipengaruhi dengan keterlambatan pengelolaan administrasi keuangan.

## 11. Meningkatnya Kualitas Materi dan Penyebaran Informasi

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
						Target	Realisasi	% Capaian
2.	Cakupan distribusi/penyebarluasan hasil-hasil kegiatan dokumentasi Pemerintah Kota	86,9%	44,12%	44,12%	99,42%	100%	90,91%	90,91
Rata-rata pencapaian kinerja								90,91



Capaian sasaran meningkatnya kualitas materi penyebaran informasi yang diukur dari cakupan distribusi/penyebarluasan hasil-hasil kegiatan dokumentasi Pemerintah Kota dengan target kinerja 100% pada tahun 2019. Kinerja telah berhasil terealisasi 90,91% sehingga capaian kinerja 90,91% atau kategori **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat diukur dari jumlah dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota yang didistribusikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dapat memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan/keputusan pimpinan.

Dimana capaian kinerja ini adalah sebanyak 6.000 exemplar dan yang terdistribusi sebanyak 9.821 exemplar, tidak terdistribusi sebanyak 893 exemplar karena ada beberapa kegiatan yang harus dirasional.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja dari tahun ke tahun, maka capaian kinerja Tahun 2019 mengalami penurunan 9,04% dibanding dari capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 99,42%.

Terjadinya penurunan pencapaian target tersebut di atas dipengaruhi dengan rasionalisasi kegiatan Pemerintah Kota Makassar.

## 12. Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
						Target	Realisasi	% Capaian
2.	Cakupan peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	-	-	100%	88,23%	90%	76,40%	84,89
Rata-rata pencapaian kinerja								84,89

Capaian sasaran meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan yang diukur dari cakupan peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dengan target kinerja 90% pada tahun 2019. Kinerja telah berhasil terealisasi 76,40% sehingga capaian kinerja 84,89% atau kategori **Tinggi**. Hal ini dapat diukur dari jumlah lembaga kemasyarakatan yang partisipasi dalam pembangunan berbanding dengan jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditarget tahun 2019 berpartisipasi dalam pembangunan.



Dimana capaian kinerja ini diukur dari Jumlah lembaga kemasyarakatan adalah 153 dan yang berpartisipasi dalam hal melakukan pelaporan terkait bentuk partisipasi yang dilakukan sebanyak 117 lembaga kemasyarakatan.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2018, maka capaian kinerja Tahun 2019 terjadi penurunan dibanding dengan capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 88,23%.

Capaian kinerja tersebut di atas dipengaruhi dengan adanya pergantian kepengurusan Lembaga kemasyarakatan.

Disamping Capaian sasaran dalam rentang waktu periode Renstra 2015 – 2019 maka untuk capaian Sasaran Tahun 2020 ditetapkan tersendiri mengingat kondisi Kota Makassar pada Tahun 2020 tidak memiliki Dokumen Renstra sebagai acuan dalam pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 pasca kemenangan Kotak Kosong pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Atas dasar tersebut maka kegiatan yang berjalan pada Tahun 2020 mengacu kepada Renstra Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Makassar

Untuk mendapatkan gambaran singkat target dan realisasi capaian sasaran maka berikut ini disajikan target dan capaian sasaran Sekretariat Kota Makassar TA. 2020 sebagai berikut:

REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR						
TAHUN 2020						
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun 2020	Rasio Capaian pada Tahun 2020
1.	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah				33.500	0%
2.	Persentase kecamatan yang berkinerja baik				20% (3 kecamatan)	20% (3 kecamatan)
3.	Persentase kelurahan yang berkinerja baik				10% (15 kelurahan)	10% (15 kelurahan)
4.	Persentase kelurahan yang tertib batas wilayah				26% (40 kelurahan)	26% (40 kelurahan)
5.	Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan				100%	80%



**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2021-2026**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun 2020	Rasio Capaian pada Tahun 2020
6.	Persentase rancangan produk hukum yang diujipublikasikan				100%	0,01%
7.	Persentase produk hukum daerah yang disebarluaskan				100%	80%
8.	Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti				100%	56,25%
9.	Persentase bantuan hukum yang diberikan				100%	100%
10.	Persentase organisasi perangkat daerah yang memenuhi standar kelembagaan				100%	100%
11.	Persentase organisasi perangkat daerah yang memenuhi standar ketatalaksanaan				100%	100%
12.	Persentase organisasi perangkat daerah yang memenuhi kriteria standar kepatuhan pelayanan publik				100%	100%
13.	Persentase Perusahaan Daerah yang berkinerja baik				100%	83,33%
14.	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah				100%	100%
15.	Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement				100%	100%
16.	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilayani oleh Pokja ULP				100%	100%
17.	Persentase ketepatan waktu proses pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa				100%	100%
18.	Persentase <i>Momemrandum of Understanding</i> (MoU) yang ditindaklanjuti menjadi Perjanjian Kerjasama (PKS)				90%	56%
19.	Persentase <i>Momemrandum of Understanding</i> (MoU) yang dievaluasi				90%	88%
20.	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat daerah				100%	100%
21.	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat Daerah				100%	100%
22.	Indeks kepuasan pelayanan rumah jabatan dan rumah dinas				100%	100%
23.	Persentase keterpenuhan pelayanan rumah jabatan dan rumah dinas				100%	100%
24.	Indeks kepuasan pelayanan kerumahtangga urusan dalam				100%	100%



**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2021-2026**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun 2020	Rasio Capaian pada Tahun 2020
24.	Indeks kepuasan pelayanan kerumahtangaan urusan dalam				100%	100%
25.	Persentase keterpenuhan pelayanan kerumahtangaan urusan dalam				100%	100%
26.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur				100%	100%
27.	Persentase pemenuhan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana				100%	80,21%
28.	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang sesuai dengan standar keprotokoleraan				90%	81,86%
29.	Persentase pelayanan tamu pemerintah daerah yang sesuai dengan standar keprotokoleraan				90%	76,67%
30.	Persentase kenaikan jumlah tamu mess Pemda Kota Makassar				100% (560 orang)	73,75%
31.	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Sekretariat Daerah				100%	100%
32.	cakupan ketersediaan laporan keuangan Sekretariat Daerah				100%	100%
33.	Persentase pembinaan rumah ibadah yang terlaksana				63,30%	0%
34.	Persentase pembinaan mental spritual kemasyarakatan yang terlaksana				100%	50%
35.	Persentase pembinaan keagamaan kemasyarakatan yang terlaksana				100%	0%
36.	Persentase Mass Media yang bekerjasama dengan pemerintah kota				100%	48%
37.	Persentase kenaikan kegiatan Pemerintah Kota yang dipublikasikan				10% (770 kegiatan)	471 kegiatan
38.	Persentase kenaikan <i>press release</i> yang dipublikasikan				10% (770 <i>press release</i> )	471 <i>press release</i>
39.	Persentase kenaikan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti				10% (880 pengaduan)	431 pengaduan
40.	Jumlah kegiatan Pemerintah Kota Makassar yang menjadi <i>tranding topik</i>				4 <i>tranding topik</i>	1
41.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)				100%	100%
42.	Persentase RT/RW dan KPM yang mendapatkan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan				100%	0%
43.	Jumlah kelurahan yang berprestasi tingkat nasional				1 Kelurahan	0%
44.	Jumlah penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat				5 Besar Tingkat nasional	0%



Berdasarkan table diatas maka secara umum dapat dilihat bahwa khusus capaian kinerja Tahun 2020 juga memperlihatkan capaian kinerja yang baik dimana realisasi dari capaian target yang ada memperlihatkan capaian 100 % meskipun memang disadari terdapat target yang belum optimal di realisasikan pada tahun 2020.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran, Sekretariat Daerah Kota Makassar memerlukan strategi dan faktor-faktor pendukung serta memperhatikan potensi peluang dan kendala yang mungkin timbul, sebagaimana tersebut dalam analisa SWOT sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Analisis SWOT Pengembangan Pelayanan**  
**Sekretariat Daerah Kota Makassar**

<p>FAKTOR EKSTERNAL</p> <p>FAKTOR INTERNAL</p>	<p>Peluang (Opportunity):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan pemanfaatan teknologi informasi dan semakin meningkatnya kecerdasan masyarakat mendorong kritis masyarakat terhadap kualitas kinerja pemerintah yang menghendaki optimalisasi pelayanan pemerintahan yang baik.</li> <li>2. Kebijakan otonomi daerah yang memberi keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih nyata dan bertanggung jawab dalam berbagai bidang.</li> <li>3. Adanya <i>political will</i> pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur daerah melalui reformasi birokrasi.</li> </ol>	<p>Tantangan (Thread):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan otonomi daerah yang masih memerlukan beberapa regulasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaannya.</li> <li>2. Sikap kritis masyarakat yang mengisyaratkan kinerja pemerintah yang belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat.</li> <li>3. Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan Good Governance .diberbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam aspek pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>4. Pertumbuhan ekonomi yang melambat sehingga diperlukan strategi Pemerintah Daerah untuk mencari sumber pembiayaan pembangunan daerah diluar dari APBN.</li> </ol>
<p>Kekuatan (strenght):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pelimpahan urusan yang luas kepada pemerintah daerah.</li> <li>2. Adanya kepemimpinan Kepala Daerah yang memiliki kapabilitas dan aksebilitas serta mobilitas yang tinggi, memungkinkan aspirasi yang berkembang lebih cepat diakomodasi.</li> </ol>	<p>Alternatif srategi: ST</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan Instansi terkait dalam rangka perumusan kebijakan hukum daerah</li> <li>2. Melakukan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>3. Melakukan Pembinaan Organisasi dan Lembaga Keagamaan</li> </ol>	<p>Alternatif strategi: SO</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Organisasi perangkat Daerah</li> <li>2. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Sekretariat Daerah.</li> <li>3. Melakukan Kordinasi baik secara internal maupun eksternal dalam merumuskan dan mengevaluasi dokumen perencanaan</li> </ol>



3. Tersedianya Sumberdaya Manusia Aparatur. 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana		
<b>Kelemahan (weakness):</b> 1. Penilaian masyarakat terhadap citra birokrasi lebih disebabkan oleh faktor sumber daya aparatur yang belum profesional dalam pelayanan dengan didukung sistem administrasi yang belum Optimal.  2. Kinerja pelayanan publik melalui kebijakan daerah yang dihasilkan masih belum sepenuhnya memuaskan para pengguna jasa publik, terutama warga masyarakat, pelaku bisnis dan para investor.	<b>Alternatif strategi: WO</b> 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang menunjang Fungsi administrasi pemerintahan umum termasuk pemenuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi.	<b>Alternatif strategi: WT</b> 1. Melakukan Monitoring dan Supervisi manajemen pengelolaan BUMD yang profesional 2. Menciptakan jejaring dan konektivitas Daerah secara nasional dan internasional 3. Melakukan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan Daerah

Sebagaimana yang terlihat dalam matrik SWOT diatas, terdapat empat kelompok strategi pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar, yang berisikan strategi-strategi:

a. Kekuatan (strenght):

1. Adanya pelimpahan urusan yang luas kepada pemerintah daerah.
2. Adanya kepemimpinan Kepala Daerah yang memiliki kapabilitas dan aksebilitas serta mobilitas yang tinggi, memungkinkan aspirasi yang berkembang lebih cepat diakomodasi.
3. Tersedianya Sumberdaya Manusia Aparatur.
4. Tersedianya Sarana dan Prasarana

b. Kelemahan (weakness):

1. Penilaian masyarakat terhadap citra birokrasi lebih disebabkan oleh faktor sumber daya aparatur yang belum profesional dalam pelayanan dengan didukung sistem administrasi yang belum Optimal.
2. Kinerja pelayanan publik melalui kebijakan daerah yang dihasilkan masih belum sepenuhnya memuaskan para pengguna jasa publik, terutama warga masyarakat, pelaku bisnis dan para investor.



c. Peluang (Opportunity):

1. Kemajuan pemanfaatan teknologi informasi dan semakin meningkatnya kecerdasan masyarakat mendorong kritis masyarakat terhadap kualitas kinerja pemerintah yang menghendaki optimalisasi pelayanan pemerintahan yang baik.
2. Kebijakan otonomi daerah yang memberi keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih nyata dan bertanggung jawab dalam berbagai bidang.
3. Adanya *political will* pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur daerah melalui reformasi birokrasi.

d. Tantangan (Thread):

1. Kebijakan otonomi daerah yang masih memerlukan beberapa regulasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaannya.
2. Sikap kritis masyarakat yang mengisyaratkan kinerja pemerintah yang belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat.
3. Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan Good Governance. diberbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam aspek pengadaan Barang dan Jasa.
4. Pertumbuhan ekonomi yang melambat sehingga diperlukan strategi Pemerintah Daerah untuk mencari sumber pembiayaan pembangunan daerah diluar dari APBN.

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan birokrasi pemerintahan daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan, maka perlu dikembangkan strategi sebagai berikut:

a. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O):

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan Instansi terkait dalam rangka perumusan kebijakan hukum daerah
2. Melakukan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
3. Melakukan Pembinaan Organisasi dan Lembaga Keagamaan

b. Strategi Kekuatan dan Tantangan (S-T):

1. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Organisasi perangkat Daerah





2. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Sekretariat Daerah.
  3. Melakukan Kordinasi baik secara internal maupun eksternal dalam merumuskan dan mengevaluasi dokumen perencanaan.
- c. Strategi Kelemahan dan Peluang (W - O):
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang menunjang Fungsi administrasi pemerintahan umum termasuk pemenuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi.
- d. Strategi Kelemahan dan Tantangan (W - T):
1. Melakukan Monitoring dan Supervisi manajemen pengelolaan BUMD yang professional.
  2. Menciptakan jejaring dan konektivitas Daerah secara nasional dan internasional.
  3. Melakukan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan Daerah.



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah.**

Sekretariat Daerah Kota Makassar yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki Sekretariat Daerah, maka penyusunan rencana strategis ini perlu memperhatikan munculnya permasalahan –baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan administrative Perangkat Daerah dan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Kota Makassar.

Secara Umum **masalah pokok yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya lebih kepada *belum Optimalnya kinerja penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan.* Kondisi ini berangkat dari masalah masalah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:**

1. Belum Optimalnya Kordinasi Perumusan Kebijakan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan. Kurangnya Koordinasi dan pelibatan Stakeholder menjadi akar permasalahan.



2. Belum Optimalnya Serapan Anggaran yang disebabkan lambatnya pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.

Salah satu akar permasalahannya adalah keterlambatan penyampaian dokumen pengadaan barang dan jasa untuk kemudian di proses dalam tahapan pengadaan barang dan jasa.

3. Belum optimalnya Pelayanan dan Administrasi Tugas Umum Pemerintahan yang secara umum berakar dari belum optimalnya pelaporan administrasi, belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana serta kualitas SDM yang mempengaruhi pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

Secara lengkap gambaran permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah digambarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 7**  
**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	<b>Belum Optimalnya Kinerja Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan</b>	<b>1 Belum Optimalnya Kordinasi Perumusan Kebijakan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan</b>	1 Masih Lemahnya Koordinasi dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan Daerah
			2 Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah dalam Melakukan Pembinaan Organisasi dan lembaga keagamaan termasuk Rumah ibadah
			3 Lemahnya Kordinasi terhadap stakeholder terkait perumusan Kebijakan Daerah
			4 Belum Optimalnya fasilitasi dan kordinasi pelaksanaan dan Penatausahaan Perjanjian Kerjasama dalam Negeri dan Luar Negeri
			5 Belum Optimalnya Peran serta Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
			6 Belum Optimalnya Perumusan Kebijakan Perkkonomian terkait BUMD yang memiliki kinerja yang baik dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap PAD
		<b>2 Belum Optimalnya Serapan Anggaran</b>	1 Belum Optimalnya serapan anggaran ditinjau dari aspekpelaknsaan Program dan kegiatan SKPD secara berkala
			2 Keterlambatan penyampaian dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa
		<b>3 Belum Optimalnya pelayanan dan Administrasi Tugas Umum Pemerintahan</b>	
2 Masih Rendahnya ketepatan waktu penyampaian dan Kualitas Dokumen Administrasi Keuangan			



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			3 Rendahnya Kualitas Administrasi Penatausahaan BMD Sekretariat Daerah pasca adanya perubahan Struktur Organisasi
			4 Belum Optimalnya Kualitas Pegawai Sekretariat Daerah dalam melaksanakan Pelayanan
			5 Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum Pemerintahan
			6 Belum optimalnya Pemenuhan dan Pemanfaatan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
			7 Belum optimalnya penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan
			8 Belum Optimalnya Pemeliharaan dan Pemanfaatan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan
			9 Perlunya Optimalisasi penyediaan Administrasi Keuangan Dan Operasional KDH dan WKDH
			10 Perlunya Optimalisasi Pemenuhan dan fasilitasi Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat daerah
			11 Masih belum optimalnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan Pelayanan
			12 Belum Optimalnya Pelayanan Keprotokoleran dan Komunikasi Pimpinan

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 bahwa Visi Pembangunan Kota Makassar adalah:

**“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang *‘Sombere’ & Smart City*” dengan imunitas Kota Yang Kuat Untuk Semua**”

Rumusan visi Pemerintah Kota Makassar merupakan Gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Makassar pada Tahun 2026. Rumusan Visi ini mengandung penjelasan masing – masing pokok visi yang dijelaskan sebagai berikut:

	DESKRIPSI	PENJELASAN
<b>VISI</b>	Percepatan mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kota Yang Kuat Untuk Semua	Percepatan mengandung makna bahwa Pemerintah Kota Makassar akan melakukan akselerasi tidak sekedar secara normal saja (business as usual) dalam menjalankan Pemerintahan dalam semua aspek.



DESKRIPSI		PENJELASAN
Pokok Visi	Kota Dunia	Makassar Sebagai Kota Pelayanan publik (public service) standar dunia yang aman, nyaman, dan berdaya saing tinggi dengan konektivitas dan kontribusi hingga ke jaringan internasional (global chain) terhadap arus orang/ barang jasa dan keuangan dengan fasilitas infrastruktur yang unggul bagi kesejahteraan warga kota makassar.
	Sombere dan Smart City	Perwujudan dari nilai nilai luhur budaya etnis Bugis , makassar yang ramah tamah dan santun serta bersahabat dan mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. Sombere berkaitan dengan heartware atau perangkat hati sedangkan smart city berkaitan dengan hardware dan software atau perangkat keras dan perangkat lunak. Diharapkan dengan sombere dan smart city menjadikan makassar kota cerdas yang berbasis teknologi serta berkarakter budaya lokal.
	Imunitas Kota Yang Kuat	Perwujudan makassar sebagai resilient city yang tangguh yang memiliki kemampuan mempersiapkan diri menghadapi dan memulihkan diri ketika menghadapi bencana / guncangan dimasa depan (ekonomi, lingkungan, sosial, dan kesehatan) guna mendorong pembangunan berkelanjutan serta tangguh terhadap kemungkinan/ ancaman bencana, termasuk dampak perubahan iklim dan semakin berkembangnya jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan.
	Untuk Semua	Kota Makassar sebagai kota inklusif yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial termasuk kelompok difabel srta memperkecil disparitas sosial dan ekonomi sehingga tercipta kesetaraan dan inklusivitas.

Adapun Misi untuk mewujudkan visi RPJMD tersebut adalah:

- 1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.** Misi ini mencakup “8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik”, yaitu: 1). Meningkatkan kualitas pendidikan melalui gerakan “semua harus sekolah”, 2). Perkuat keimanan ummat, 3). 1000 beasiswa “Anak Lorong Berprestasi”, 4).10.000 skill training gratis, 5). Percepatan tata



kelola pemerintahan "Sombere' dan Smart" bersih dari indikasi korupsi, 6). Menuju PAD Rp. 2 Trilyun, 7). Menuju insentif kinerja RT/RW Rp. 2 Juta dan perkuat fungsi RT/RW dan penasehat Walikota serta para Local Influencer, 8). Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang "Sombere' dan Smart".

**2. Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.**

Misi ini mencakup "8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik", yaitu: 1). Gerakan masyarakat perkuat imunitas kesehatan dan ekonomi, 2). Perkuat fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, 3). Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru, 4). Penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation, 5) Pembuatan

Peraturan Daerah (Perda) Omnibus "Makassar Kota Dunia", 6). Percepatan program Jagai Anak Ta' dan program Smart Millennial serta Mitigasi Sosial, 7). Penataan total destinasi budaya dan sejarah, 8). Penguatan City Branding dan peningkatan festival dan MICE bulanan dalam skala nasional dan internasional.

**3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang**

"sombere' dan smart city" untuk semua. Misi ini mencakup "8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik", yaitu: 1). Penataan total system persampahan, 2). Pembenahan total system penanganan banjir dan penanganan kemacetan, 3). Pembangunan infrastruktur dan kawasan "waterfront city" berbasis mitigasi dan adaptasi lingkungan, 4). Peningkatan jejaring smart pedestrian dan koridor hijau kota, 5). Peningkatan Lorong Garden dan pembentukan 5000 lorong wisata, 6). Percepatan pembangunan sistem dan infrastruktur "Sombere' dan Smart" yang inklusif, 7). Percepatan Makassar menjadi Livable City dan Resilient City, 8). Pembangunan Gedung "Sombere' dan Smart" New Balaikota dan New DPRD.



Menelaah pernyataan visi, misi serta program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih dihubungkan dengan pelayanan yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kota Makassar maka secara umum terdapat keterkaitan dengan pelayanan Sekretariat Daerah baik keterkaitan yang kuat secara langsung maupun keterkaitan yang bersifat supporting atau dukungan pada SKPD lain selaku leading sektor pemangku kepentingan atas pelaksanaan program prioritas dimaksud.

Untuk misi kesatu terkait dengan pelayanan di Sekretariat Daerah yakni **Misi I: *Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi*** terdapat 1 Program yang memiliki keterkaitan kuat dengan pelayanan Sekretariat Daerah yakni **Program prioritas *Perkuat Keimanan Ummat (Bagian Kesejahteraan Rakyat)*** sedangkan ketiga program prioritas lainnya bersifat supporting atau pendukung terhadap SKPD pemangku kepentingan sebagai pelaksana program prioritas dimaksud.

Untuk Misi Kedua : ***Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua*** terkait dengan Pelayanan Sekretariat Daerah memiliki keterkaitan kuat dengan dua program prioritas yakni:

1. Program prioritas penataan total Sistem BUMD dan Pembentukan Makassar incorporation (Bagian Perekonomian)
2. Program Prioritas Pembuatan Perda Omnibus Makassar Kota Dunia (Bagian Hukum)

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat Daerah Kota Makassar terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat di lihat pada tabel 8 dibawah ini:



**Tabel 8**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Makassar terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas					
Kota yang Kuat Untuk semua					
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih		Permasalahan SKPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2		3	4	5
1	Misi :	1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik kelas Dunia bersih dari Indikasi Korupsi			
	Program :	2. Perkuat keimanan umat	Terbatasnya Kemampuan keuangan Daerah Dalam Melakukan Pembinaan Organisasi dan Lembaga Keagamaan termasuk Rumah Ibadah.	Terbatasnya Sumber Pendanaan	Kordinasi dengan stakeholder dalam rangka pendataan yang intens
2	Misi :	2. Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial, dan Budaya menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunisasi Ekonomi dan Kesehatan Kota yang kuat untuk Semua.			
	Program :	1. Penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation	Belum Optimalnya Perumusan Kebijakan Perkkonomian terkait BUMD yang memiliki kinerja yang baik dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap PAD	Rendahnya Profesionalitas Manajemen Perusahaan Daerah	Terbitnya Peraturan Daerah Yang Baru terkait Perseroda Kota Makassar
		2. Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Omnibus "Makassar Kota Dunia	Lemahnya Kordinasi terhadap stakeholder terkait perumusan Kebijakan Daerah	Belum Optimalnya koordinasi dengan SKPD selaku Stakeholder	Tersedianya Aturan/ Payung hukum dalam pelaksanaan Pembuatan Perda Omnibus LAW

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi

Renstra Sekretariat Daerah Kota Makassar berupaya mengemukakan faktor faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan





Perangkat Daerah ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/ Lembaga dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB ataupun Renstra Provinsi Sulawesi – Selatan.

Untuk melihat kesesuaian dan atau ketidak sesuaian terkait dokumen perencanaan kementerian/ Lembaga dengan Renstra Provinsi Sulawesi selatan dan renstra Sekretariat Daerah digambarkan dalam table dibawah ini:

**Tabel 9**  
**Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga, Renstra Provinsi dan**  
**Renstra Sekretariat Daerah Kota Makassar**

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD	Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran Renstra SKPD/ Kementerian/ Lembaga
1	1 Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) 2 Terlaksananya Kegiatan dan Evaluasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3 % Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah 4 % Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri 5 % Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian Jumlah BUMD yang berkinerja baik 6 % Penyerapan Realisasi Anggaran melalui SISMONTPEPRA 7 Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa 8 Terselenggaranya Kegiatan-kegiatan Kelembagaan kemasyarakatan di 153 Kelurahan di Kota Makassar	<b>1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>1</b> Meningkatnya Tata Kelola Dan Kualitas Perumusan kebijakan Penyelenggaraan administrasi di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum	1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah 2 optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan
2	1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan	<b>2</b> Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	<b>2</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	<b>3</b> Meningkatnya kualitas tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri



No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD	Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran Renstra SKPD/ Kementerian/ Lembaga
2	3 % Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	4 % Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	5 % Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	6 % Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	7 % Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	8 % Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			
	9 % Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
	10 % Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
	11 Terlaksananya Penataan Organisasi		3 Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Perumusan Kebijakan penyelenggaraan di bidang Organisasi, Umum dan Administrasi Pimpinan	
	12 Jumlah Pelayanan, Fasilitasi Keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota makassar			

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, tidak ditemukan faktor-faktor yang bersifat menghambat dan secara signifikan mempengaruhi penanganan permasalahan yang ada pada Sekretariat Daerah Kota Makassar. Selanjutnya terdapat kesesuaian sasaran Rencana Strategis antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Renstra Sekretariat Kota Makassar.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Terkait dengan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan Hidup Strategis maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Sekretariat Daerah dalam melaksanakan urusan penunjang



pemerintah daerah dan setelah dilakukan penelaahan disimpulkan tidak terdapat implikasi RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis terhadap Renstra Sekretariat Daerah Kota Makassar.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu merupakan permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga harus dicermati secara cerdas. Ada beberapa isu strategis yang perlu diselesaikan oleh Sekretariat Daerah diantaranya :

1. Penyederhanaan Struktur Jabatan melalui Penyetaraan Jabatan Adminitrasi kedalam Jabatan Fungsional.
2. Perbaikan Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan melalui evaluasi kinerja/ perbaikan struktur Organisasi dan peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan.
3. Penyusunan Perda Omnibus LAW Lingkup Kota Makassar
4. Pelaksanaan Makassar Recover, Penyesuaian Anggaran dan Penyesuaian jam kerja melalui WorkFrom Home dan WorkFrom Office.

Secara jelas Isu Strategis dari lingkungan Eksternal yang berpengaruh terhadap pelayanan Sekretariat Daerah Kota Makassar dapat di gambarkan dalam Tabel dibawah ini:



**Tabel 10**  
**Identifikasi Isu – Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)**

NO.	ISU STRATEGIS				
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain	Unit Kerja
1	2	3	4	5	6
1.	Pandemi Covid 19	Pemberlakuan PSPB dan PPKM Secara Nasional untuk menangani pandemi Covid 19	Pelaksanaan Makassar Recover, dan penyesuaian jam kerja melalui Work From Home dan Work From Office Lingkup Pemerintah Kota Makassar		Bagian Ortala, Bagian Umum, Bagian Perencanaan Dan Keuangan
2.		Reformasi Birokrasi dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi dengan terbitnya PermenPANRB No.17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional	Penyederhanaan Struktur Jabatan melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional Lingkup Pemerintah Kota Makassar		Bagian Ortala
3.		Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan	Perbaikan Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan melalui evaluasi kinerja/ perbaikan struktur dan peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan		Bagian Umum, Bagian ULP, Bagian Kesra, Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Protokol, Bagian Perekonomian, Bagian Kerjasama.
4		Omnibus LAW dengan Terbitnya Undang - Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja	Penyusunan Perda Omnibus LAW Lingkup Kota Makassar		Bagian Hukum



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran**

Berangkat dari kondisi faktual dan hasil analisis lingkungan strategis, baik menyangkut potensi, kemampuan, keterbatasan dan isu-isu strategis yang masih harus diselesaikan Pemerintah Kota Makassar, maka untuk menyelenggarakan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan harus di rencanakan dan disusun berdasarkan pemahaman, penghayatan, dan kesepakatan semua pihak yang terkait (*stakeholders*). Hal tersebut berada dalam sebuah bingkai cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Olehnya itu perlu dilakukan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah.

Guna mendukung program pembangunan Pemerintah Kota Makassar, kedepan maka sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kota Makassar mendukung Misi Pertama yaitu: “Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan public kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.”

Misi Kedua: Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan Kesehatan kota yang kuat untuk semua.

Dalam kerangka pemecahan masalah serta menangani isu strategis daerah yang dihadapi maka tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Makassar dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Efektif.

Perumusan sasaran memperhatikan indicator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Untuk lima tahun kedepan Sekretariat Daerah Kota Makassar menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan.



Adapun Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah Kota Makassar beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 11**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Sekretariat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif</b>	<b>1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	1 Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
			2 Terlaksananya dan di Evaluasinya kebijakan Kesejahteraan Rakyat	27 Kegiatan	27 Kegiatan	27 Kegiatan	27 Kegiatan	27 Kegiatan
			3 % Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			4 % Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri	100%	100%	100%	100%	100%
			5 % Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian Jumlah BUMD yang berkinerja baik	100%	100%	100%	100%	100%
			6 % Penyerapan Realisasi Anggaran melalui SISMONTPEPRA	90%	90%	90%	90%	90%
			7 Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level
			8 Terselenggaranya Kegiatan-kegiatan Kelembagaan kemasyarakatan di 153 Kelurahan di Kota Makassar	153 Kelurahan	153 Kelurahan	153 Kelurahan	153 Kelurahan	153 Kelurahan
		<b>2. Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan</b>	1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
			2 Terpenuhiya Dokumen Administrasi Keuangan	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen
			3 % Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%



**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
			4 % Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			5 % Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			6 % Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			7 % Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			8 % Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%
			9 % Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			10 % Tersedianya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			11 Terlaksananya Penataan Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%
			12 Jumlah Pelayanan Fasilitas Keprotokoleraan & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar	1160 Pelayanan	1160 Pelayanan	1160 Pelayanan	1160 Pelayanan	1160 Pelayanan



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan – pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Sekretariat Daerah Kota Makassar menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan sasaran maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT seperti yang telah dibahas pada BAB II pada Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka di tetapkan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang sebagaimana pada tabel 12 berikut :

**Tabel 12**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Sekretariat Daerah**

VISI : " Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang sombere dan smart city dengan imunitas kota yang kuat untuk semua "			
MISI : 1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang ungggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif</b>	<b>1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	1 Melakukan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan Daerah	1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan Daerah
		2 Melakukan Pembinaan Organisasi dan Lembaga Keagamaan	2 Meningkatkan Mental dan Spiritual Kemasyarakatan
		3 Melakukan koordinasi dengan SKPD dan Instansi terkait dalam rangka perumusan kebijakan hukum daerah	3 Meningkatkan Penataan Produk Hukum Daerah
		4 Menciptakan jejaring dan konektivitas Daerah secara nasional dan internasional	4 Meningkatkan Kerjasama Daerah baik secara nasional maupun internasional
		5 Melakukan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	5 Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
		6 Melakukan Monitoring dan Supervisi manajemen pengelolaan BUMD yang profesional	6 Peningkatan Kualitas Kebijakan Perekonomian
		7 Melakukan Evaluasi Capaian Program Dan Kegiatan secara berkala	7 Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Anggaran APBD
		8 Melakukan Pendampingan, Monitoring dan evaluasi pengadaan barang Dan Jasa	8 Peningkatan Kualitas pengadaan Barang Dan Jasa





**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<b>2 Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan</b>	<b>1</b> Melakukan Kordinasi baik secara internal maupun eksternal dalam merumuskan dan mengevaluasi dokumen perencanaan	<b>1</b> Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan
		<b>2</b> Melakukan verifikasi berjenjang terkait dokumen Administrasi Keuangan	<b>2</b> Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan
		<b>3</b> Melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah secara berkala	<b>3</b> Meningkatkan Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah
		<b>4</b> Melakukan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Sekretariat Daerah.	<b>4</b> Meningkatkan Kualitas SDM Pegawai Sekretariat Daerah
		<b>5</b> Melakukan inventarisasi terkait kebutuhan penyelenggaraan administrasi umum Perangkat daerah	<b>5</b> Pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum Perangkat daerah dan Peningkatan Pelayanan
		<b>6</b> Melakukan Inventarisasi Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah berdasarkan Skala prioritas	<b>6</b> Pengadaan Barang Milik Daerah secara efektif dan efisien
		<b>7</b> Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	<b>7</b> Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
		<b>8</b> Melakukan Inventarisasi Status dan Kondisi Barang Milik Daerah	<b>8</b> Meningkatkan Masa Manfaat Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan
		<b>9</b> Melakukan Verifikasi terkait pemenuhan Administrasi Keuangan kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	<b>9</b> Tertib dan lancarnya administrasi Pengelolaan keuangan KDH/WKDH
		<b>10</b> Melakukan Inventarisasi dan fasilitasi kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	<b>10</b> Peningkatan Kualitas Pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		<b>11</b> Melaksanakan Evaluasi Kinerja Organisasi perangkat Daerah	<b>11</b> Meningkatnya Kualitas kinerja Organisasi perangkat Daerah
		<b>12</b> Melakukan Fasilitasi, komunikasi dan dokumentasi Keprotokoleran	<b>12</b> Meningkatnya Pelayanan keprotokoleran



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2021 - 2026 adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang otonomi daerah, maka dalam menetapkan program kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Kota Makassar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021 - 2026.

Secara umum program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan di jalankan dalam rangka menunjang tercapainya visi dan misi tersebut sebagai berikut:

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.</li><li>2. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.</li><li>3. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.</li></ol>



<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li><li>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.</li><li>3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.</li><li>4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.</li><li>5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</li></ol>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.</li><li>2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.</li><li>3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.</li><li>4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.</li><li>5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</li><li>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD.</li></ol>
	Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.</li><li>2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.</li></ol>
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.</li><li>2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.</li></ol>
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.</li><li>2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.</li></ol>



		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.</li><li>4. Fasilitas Kunjungan Tamu.</li><li>5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.</li></ol>
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.</li><li>2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.</li><li>3. Pengadaan Mebel.</li><li>4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.</li></ol>
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.</li><li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.</li><li>3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.</li></ol>
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.</li><li>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.</li><li>3. Pemeliharaan Mebel.</li><li>4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.</li><li>5. Penyediaan/ Rehabilitasi Gedung Kantoran dan Bangunan Lainnya.</li></ol>
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</li><li>2. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</li></ol>



		3. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah. 2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah. 3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.
	Penataan Organisasi	1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan. 2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana. 3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1. Fasilitasi Keprotokolan. 2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan. 3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan.
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Administrasi Tata Pemerintahan	1. Penataan Administrasi Pemerintahan. 2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan. 3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual. 2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial. 3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah. 2. Fasilitasi Bantuan Hukum.



		3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri. 2. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri. 3. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD. 2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. 3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil.
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan. 2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. 3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. 2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Secara utuh rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif digambarkan pada tabel berikut :



**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2021-2026**

Tabel 13

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kota Makassar

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Kelompok sasaran					
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				Target	Rp (dalam ribu)			
1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	1 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	4	01	02	1 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Outcome	Cakupan Pembinaan dan Pelayanan Kegiatan Keamanan	80%	Rp 22.944.619.000	100%	Rp 23.806.687.000	100%	Rp 25.127.133.000	100%	Rp 26.992.158.000	100%	Rp 29.475.916.000	100%	Rp 128.346.513.000	Sekretariat Daerah	Kota Makassar		
									Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi									
									100%		100%		100%		100%									
									75%		90%		95%		100%									
		2 Terlaksananya Kegiatan dan Evaluasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2	Cakupan Penataan Administrasi Tata Pemerintahan	4	01	02	1. Administrasi Tata Pemerintahan	Outcome	% Terlaksananya Administrasi Pemerintahan	100%	Rp 2.766.253.000	100%	Rp 2.870.188.000	100%	Rp 3.029.384.000	100%	Rp 3.254.234.000	100%	Rp 3.553.681.000	100%	Rp 15.473.740.000	Bagian Tata Pemerintahan	Kota Makassar
											56% (25% M00 dari total 14)		100%		100%		100%							
											100%		100%		100%		100%							
											75%		90%		95%		100%							
3 % Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah	3	Cakupan Produk Hukum Daerah	4	01	02	1. Penataan Administrasi Pemerintahan	Output	Jumlah dokumen kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	4 Dokumen	Rp 498.715.000	4 Dokumen	Rp 517.453.000	4 Dokumen	Rp 546.155.000	4 Dokumen	Rp 586.691.000	4 Dokumen	Rp 640.677.000	20 Dokumen	Rp 2.789.691.000	Subbagian Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Makassar		
									2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan									
									4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan									
									12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan									
4 % Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri	4	Persentase Perjanjian Kerjasama Daerah	4	01	02	1. Penataan Administrasi Pemerintahan	Output	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan	2 Laporan	Rp 498.715.000	2 Laporan	Rp 517.453.000	2 Laporan	Rp 546.155.000	2 Laporan	Rp 586.691.000	2 Laporan	Rp 640.677.000	10 Laporan	Rp 2.789.691.000	Subbagian Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Makassar		
									4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan									
									12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan									
									4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan									
5 % Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Jumlah BUMD yang berkinerja baik	5	% Terlaksananya Administrasi Pemerintahan	4	01	02	1. Penataan Administrasi Pemerintahan	Output	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	Rp 498.715.000	4 Dokumen	Rp 517.453.000	4 Dokumen	Rp 546.155.000	4 Dokumen	Rp 586.691.000	4 Dokumen	Rp 640.677.000	20 Laporan	Rp 2.789.691.000	Subbagian Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Makassar		
									12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan									
									4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan									
									4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan									
6 % Penyerapan Realisasi Anggaran melalui SIMONTEPRA	6	Jumlah dokumen kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	4	01	02	1. Penataan Administrasi Pemerintahan	Output	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan	2 Laporan	Rp 498.715.000	2 Laporan	Rp 517.453.000	2 Laporan	Rp 546.155.000	2 Laporan	Rp 586.691.000	2 Laporan	Rp 640.677.000	10 Laporan	Rp 2.789.691.000	Subbagian Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Makassar		
									4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan									
									12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan									
									4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan									
7 Manerita/Kematangan Unit Kerja Pengaduan Barang dan Jasa	7	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan	4	01	02	1. Penataan Administrasi Pemerintahan	Output	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan	2 Laporan	Rp 498.715.000	2 Laporan	Rp 517.453.000	2 Laporan	Rp 546.155.000	2 Laporan	Rp 586.691.000	2 Laporan	Rp 640.677.000	10 Laporan	Rp 2.789.691.000	Subbagian Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Makassar		
									4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan									
									12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan									
									4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan									
8 Terselenggaranya Kegiatan-kegiatan Kelembagaan kemasyarakatan di 153 Kelurahan di Kota Makassar	8	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan	4	01	02	1. Penataan Administrasi Pemerintahan	Output	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan	2 Laporan	Rp 498.715.000	2 Laporan	Rp 517.453.000	2 Laporan	Rp 546.155.000	2 Laporan	Rp 586.691.000	2 Laporan	Rp 640.677.000	10 Laporan	Rp 2.789.691.000	Subbagian Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Makassar		
									4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan									
									12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan									
									4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan									



**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2021-2026**

1	2	3	4	5	6	7	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										19	20	21							
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				Target	Rp (dalam ribu)					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18						
			4	01	02	2.01	02	2.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Output	Jumlah dokumen penetapan kode dan data kewilayahan	1 Laporan	Rp 1.383.715.700	1 Laporan	Rp 1.435.705.000	1 Laporan	Rp 1.515.336.000	1 Laporan	Rp 1.627.810.000	1 Laporan	Rp 1.777.597.000	5 Laporan	Rp 7.740.163.700	Subbagian Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Makassar	Kecamatan dan Kelurahan Lingjup Kota Makassar
											Jumlah kecamatan dan kelurahan yang dilakukan fasilitasi topografi dan pemetaan wilayah	168 Kec/Kel		168 Kec/Kel		168 Kec/Kel		168 Kec/Kel		168 Kec/Kel		840 Kec/Kel				
											Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan Pembinaan Wilayah	5 Kec/Kel		5 Kec/Kel		5 Kec/Kel		5 Kec/Kel		5 Kec/Kel		25 Kec/Kel				
											Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan Penegasan Batas Wilayah	42 Kec/Kel		42 Kec/Kel		42 Kec/Kel		42 Kec/Kel		42 Kec/Kel		210 Kec/Kel				
											Jumlah Kelurahan yang dilakukan Pemantapan Penyelenggaraan Dana Kelurahan	153 Kelurahan		153 Kelurahan		153 Kelurahan		153 Kelurahan		153 Kelurahan		153 Kelurahan				
											Jumlah Keputusan Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		20 dokumen				
											Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	15 Laporan		15 Laporan		15 Laporan		15 Laporan		15 Laporan		75 Laporan				
			4	01	02	2.01	3	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Output	Jumlah Dokumen Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LIPPD)	1 Laporan	Rp 883.822.300	1 Laporan	Rp 917.030.000	1 Laporan	Rp 967.893.000	1 Laporan	Rp 1.039.733.000	1 Laporan	Rp 1.135.407.000	5 Laporan	Rp 4.943.885.300	Subbagian Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Kota Makassar	Kecamatan dan Kelurahan Lingjup Kota Makassar
											Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang tersusun	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan				
											Jumlah Laporan Evaluasi Penyelenggaraan otonomi Daerah	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan				
											Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Akhir Tahun Walikota	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 Laporan				
											Jumlah Peralatan Komputer Jaringan Sistem Informasi E-LPPD dan E-Eppd	4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		20 Unit				
											Jumlah Usul dan Keputusan Pergantian Antar Waktu Pimpinan dan Anggota DPRD Kota	6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		30 Dokumen				
											Jumlah usul dan surat izin/cuti Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		30 Dokumen				





**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Kelompok sasaran
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Rp (dalam ribu)					
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			4 01 02 2.02	2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Outcome : Terlaksananya kegiatan dan Evaluasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat	27 Kegiatan	Rp 11.984.941.200	27 kegiatan	Rp 12.435.235.000	27 kegiatan	Rp 13.124.960.000	27 kegiatan	Rp 14.099.143.000	27 kegiatan	Rp 15.396.515.000	50 Kebijakan	Rp 67.040.794.200	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kota Makassar	Lemba Kegamaan dan Rumah Ibadah Lingkup Kota Makassar			
			4 01 02 2.02 01	1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Output : Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan bina mental spiritual	22 Kegiatan	Rp 11.002.961.200	22 Kegiatan	Rp 11.416.360.000	22 Kegiatan	Rp 12.049.573.000	22 Kegiatan	Rp 12.943.937.000	22 Kegiatan	Rp 14.135.010.000	100 Kegiatan	Rp 61.547.841.200	Kasubag Bina Mental Spiritual	Kota Makassar	Lemba Kegamaan dan Rumah Ibadah Lingkup Kota Makassar			
			4 01 02 2.02 02	2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Output : Jumlah pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	5 Kebijakan	Rp 506.268.200	5 Kebijakan	Rp 525.290.000	5 Kebijakan	Rp 554.425.000	5 Kebijakan	Rp 595.576.000	5 Kebijakan	Rp 650.380.000	25 Kebijakan	Rp 2.831.939.200	Kasubag Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Kota Makassar	Lemba Kegamaan dan Rumah Ibadah Lingkup Kota Makassar			
			4 01 02 2.02 03	3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Output : Jumlah pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	5 Kebijakan	Rp 475.711.800	5 Kebijakan	Rp 493.585.000	5 Kebijakan	Rp 520.962.000	5 Kebijakan	Rp 559.630.000	5 Kebijakan	Rp 611.125.000	25 Kebijakan	Rp 2.661.013.800	Kasubag Kesejahteraan Rakyat NonPelayanan Dasar	Kota Makassar	Lemba Kegamaan dan Rumah Ibadah Lingkup Kota Makassar			
			4 01 02 2.03	3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Outcome : % Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	Rp 3.903.175.800	100%	Rp 4.049.824.000	100%	Rp 4.274.448.000	100%	Rp 4.591.712.000	100%	Rp 5.014.231.000	100%	Rp 21.833.390.800	Kepala Bagian Hukum	Kota Makassar	SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar			
			4 01 02 2.03 01	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Output : Jumlah Penyusunan Produk Hukum Daerah	120 PRODUK HUKUM	Rp 1.478.876.700	120 PRODUK HUKUM	Rp 1.534.440.500	120 PRODUK HUKUM	Rp 1.619.548.000	120 PRODUK HUKUM	Rp 1.739.756.000	120 PRODUK HUKUM	Rp 1.899.844.000	500 Produk Hukum	Rp 8.272.465.200	Kasubag Perundang-Undangan	Kota Makassar	SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar			
			4 01 02 2.03 02	2. Fasilitasi Bantuan Hukum	Output : Jumlah Pemanganan Perkara dan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 PERKARA	Rp 1.345.312.800	12 PERKARA	Rp 1.395.850.000	12 PERKARA	Rp 1.473.280.000	12 PERKARA	Rp 1.582.632.000	12 PERKARA	Rp 1.728.262.000	60 Perkara	Rp 7.525.344.800	Kasubag Bantuan Hukum	Kota Makassar	SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar			
			4 01 02 2.03 03	3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Output : Jumlah Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	120 PRODUK HUKUM	Rp 1.078.986.300	120 PRODUK HUKUM	Rp 1.119.525.500	120 PRODUK HUKUM	Rp 1.181.620.000	120 PRODUK HUKUM	Rp 1.269.324.000	120 PRODUK HUKUM	Rp 1.396.125.000	500 Produk Hukum	Rp 6.035.580.800	Kasubag Dokumentasi dan Informasi	Kota Makassar	SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar			
			4 01 02 2.04	4. Fasilitasi Kerjasama Daerah	Outcome : % Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri	100%	Rp 4.290.249.000	100%	Rp 4.451.440.000	100%	Rp 4.698.341.000	100%	Rp 5.047.069.000	100%	Rp 5.511.489.000	100%	Rp 23.998.588.000	Kepala Bagian Kerjasama	Kota Makassar	Forum Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri			
			4 01 02 2.04 01	1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Output : Jumlah Dokumen Kerjasama Dalam Negeri yang di tanda tangani Jumlah Dokumen Kerjasama Dalam Negeri yang mempunyai rekomendasi dari tim koordinasi. Jumlah Kesepakatan Kerjasama yang tercapai.	20 Dokumen Kerjasama 20 Dokumen Kerjasama 20 Dokumen Kerjasama	Rp 1.889.672.300	20 Dokumen Kerjasama 20 Dokumen Kerjasama 20 Dokumen Kerjasama	Rp 1.960.670.000	20 Dokumen Kerjasama 20 Dokumen Kerjasama 20 Dokumen Kerjasama	Rp 2.069.419.500	20 Dokumen Kerjasama 20 Dokumen Kerjasama 20 Dokumen Kerjasama	Rp 2.223.020.000	20 Dokumen Kerjasama 20 Dokumen Kerjasama 20 Dokumen Kerjasama	Rp 2.427.577.000	100 Dokumen Kerjasama 100 Dokumen Kerjasama 100 Dokumen Kerjasama	Rp 10.570.358.800	Kasubag Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kota Makassar	Forum Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri			



**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Kelompok sasaran		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				Target	Rp (dalam ribu)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4 01 02 2.04 02		2. Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Output : Forum Investasi Luar Negeri. Jumlah Dokumen Kerjasama Luar Negeri. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri.		2 Forum Kerjasama	Rp 1.708.012.200	1 Forum Kerjasama	Rp 1.772.185.000	1 Forum Kerjasama	Rp 1.870.480.000	1 Forum Kerjasama	Rp 2.009.313.500	1 Forum Kerjasama	Rp 2.194.206.000	5 Forum Kerjasama	Rp 9.554.196.700	Kasubag. Fasilitas Kerjasama Luar Negeri	Kota Makassar	Forum Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri
		4 01 02 2.04 03		3. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Output : Buku Potensi Kerjasama. Jumlah Laporan dan Data Kerjasama secara Berkala yang di dokumentasikan. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri.		100 Eksemplar	Rp 692.564.500	100 Eksemplar	Rp 718.585.000	100 Eksemplar	Rp 758.441.500	100 Eksemplar	Rp 814.735.500	100 Eksemplar	Rp 889.706.000	500 Eksemplar	Rp 3.874.032.500	Kasubag. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Kota Makassar	Forum Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri
		4 01 03	2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Outcome : Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya Yang Ditantangani Pada Kuartal Pertama	0%															
					Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	100%															
					Persentase Perusahaan Daerah Yang Berkinerja Baik	83,33%	100%	Rp 10.266.576.000	100%	Rp 10.652.302.000	100%	Rp 11.243.139.000	100%	Rp 12.077.645.000	100%	Rp 13.189.004.000	100%	Rp 57.428.666.000	Sekretariat Daerah	Kota Makassar	
					Persentase Penyerapan realisasi anggaran melalui Sistem Monitoring Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (SIMONTEPRA)	100%	100%		100%		100%		100%	100%		100%					
		4 01 03 2.01	1	1 Pelaksanaan Kebijakan Perkonomian	Outcome : % Terselainya Rumusan Kebijakan Perkonomian dan Jumlah BUMD yang berkinerja baik	100%	Rp 3.384.550.400	100%	Rp 3.511.710.000	100%	Rp 3.706.489.920	100%	Rp 3.981.599.000	100%	Rp 4.347.976.000	100%	Rp 18.932.325.200	Kepala Bagian Perkonomian	Kota Makassar	BUMD Pemerintah Kota Makassar	
		4 01 03 2.01 1	1	1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengolahan BUMD dan BLUD	Output : Jumlah Laporan kinerja manajemen dan Keuangan BUMD dan BLUD	26 laporan BUMD/BLUD	Rp 2.393.653.400	26 laporan BUMD/BLUD	Rp 2.483.594.000	26 laporan BUMD/BLUD	Rp 2.621.338.920	26 laporan BUMD/BLUD	Rp 2.815.905.000	26 laporan BUMD/BLUD	Rp 3.075.018.000	130 laporan BUMD/BLUD	Rp 13.389.499.320	Bagian Perkonomian	Kota Makassar	BUMD Pemerintah Kota Makassar	
					Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Asesment BLUD dan BUMD	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan	10 Kegiatan						
					Jumlah Rapat Koordinasi Khusus, Sosialisasi, Workshop, BinteK Lingkup BLUD dan BUMD Kota Makassar	4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali	20 Kali						
					Tersusunnya Dokumen Bisnis plan dan Corporate plan/RKAP BUMD dan BLUD	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen	60 Dokumen						



**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Kelompok sasaran	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)					Target
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			4 01 03 2.01 02	2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Output	Jumlah Laporan Informasi dan Rekomendasi Distribusi dan Pengendalian Perekonomian	2 Laporan	Rp 471.161.000	2 Laporan	Rp 488.863.000	2 Laporan	Rp 515.978.000	2 Laporan	Rp 554.275.000	2 Laporan	Rp 605.278.000	10 laporan	Rp 2.635.555.000	Bagian Perekonomian	Kota Makassar	BUMD Pemerintah Kota Makassar
						Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Infansi Daerah	4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali	20 kali					
						Jumlah Kegiatan Sosialisasi/ FGD terkait pengendalian dan distribusi perekonomian	2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan	10 kegiatan					
			4 01 03 2.01 03	3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Output	Jumlah Rapat Koordinasi	4 Kali	Rp 519.736.000	4 Kali	Rp 539.263.000	4 Kali	Rp 569.173.000	4 Kali	Rp 611.419.000	4 Kali	Rp 667.680.000	20 kali	Rp 2.907.271.000	Bagian Perekonomian	Kota Makassar	BUMD Pemerintah Kota Makassar
						Jumlah Peserta yang di Edukasi	180 Orang		180 Orang		180 Orang		180 Orang		180 Orang	900 Orang					
						Jumlah Laporan Informasi dan Rekomendasi terkait Perencanaan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	10 Laporan					
			4 01 03 2.02	2 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Outcome	% Penyerapan Anggaran melalui SISMOPEPRA	90%	Rp 1.071.265.400	90%	Rp 1.111.514.000	90%	Rp 1.173.165.000	90%	Rp 1.260.240.000	90%	Rp 1.376.206.000	90%	Rp 5.992.390.400	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Kota Makassar	SKPD Lingkup Kota Makassar
			4 01 03 2.02 01	1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Output	Jumlah dokumen penyusunan program pembangunan yang difasilitasi	1 Dokumen	Rp 297.028.400	1 Dokumen	Rp 308.188.000	1 Dokumen	Rp 325.283.000	1 Dokumen	Rp 349.425.000	1 Dokumen	Rp 381.580.000	5 Dokumen	Rp 1.661.504.400	Kasubag. Penyusunan Program	Kota Makassar	SKPD Lingkup Kota Makassar
						Jumlah CSR yang difasilitasi	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5 Dokumen					
			4 01 03 2.02 02	2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Output	Jumlah Dokumen Program Pembangunan yang dibenarkan dan dievaluasi	1 Dokumen	Rp 383.909.000	1 Dokumen	Rp 398.333.000	1 Dokumen	Rp 420.426.000	1 Dokumen	Rp 451.632.000	1 Dokumen	Rp 493.190.000	5 Dokumen	Rp 2.147.490.000	Kasubag. Pengendalian Program	Kota Makassar	SKPD Lingkup Kota Makassar
						Jumlah SKPD yang mendapatkan DAK	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5 Dokumen					
			4 01 03 2.02 03	3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Output	% SKPD Yang mengisi Laporan Evaluasi dan Pengawasan Anggaran pada Aplikasi Sismonteptra Tepat Waktu	100%	Rp 390.328.000	100%	Rp 404.993.000	100%	Rp 427.456.000	100%	Rp 459.183.000	100%	Rp 501.436.000	100%	Rp 2.183.396.000	Kasubag. Evaluasi & Pelaporan	Kota Makassar	SKPD Lingkup Kota Makassar
			4 01 03 2.03	3 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Outcome	Manurfas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	3 Level	Rp 5.810.760.200	3 Level	Rp 6.029.078.000	3 Level	Rp 6.363.484.000	3 Level	Rp 6.835.806.000	3 Level	Rp 7.464.822.000	3 Level	Rp 32.503.950.200	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Kota Makassar	SKPD Lingkup Kota Makassar
			4 01 03 2.03 01	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Output	Jumlah pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilayani	200 Paket	Rp 1.977.864.200	200 Paket	Rp 2.052.175.000	200 Paket	Rp 2.166.000.000	200 Paket	Rp 2.326.770.000	200 Paket	Rp 2.540.874.000	1000 Paket	Rp 11.063.683.200	Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Kota Makassar	SKPD Lingkup Kota Makassar





**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Kelompok sasaran			
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				Target	Rp (dalam ribu)	
1							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			2.13.06.2.02.04	2. Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Poyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Output	Terseleenggaranya Pembinaan LPM dan Peningkatan Peran Kelembagaan dalam kegiatan pengembangan Kelurahan	153 Kelurahan	Rp 2.691.636.000	153 Kelurahan	Rp 2.792.765.000	153 Kelurahan	Rp 2.947.666.500	153 Kelurahan	Rp 3.166.455.000	153 Kelurahan	Rp 3.457.823.000	153 Kelurahan	Rp 15.056.345.500	Kasubag Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan/Kelurahan (RT, RW, PKK, Poyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Makassar	153 Kelurahan Lingkup Kota Makassar	
			2.13.07.2.03.06	3. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Output	Terseleenggaranya syembara dan Pembinaan Kelompok TTG	153 Kelurahan	Rp 396.833.000	153 Kelurahan	Rp 411.742.000	153 Kelurahan	Rp 434.580.000	153 Kelurahan	Rp 466.833.000	153 Kelurahan	Rp 509.793.000	153 Kelurahan	Rp 2.219.783.000	Kasubag Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Makassar	153 Kelurahan Lingkup Kota Makassar	
2	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01	4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Outcome	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, Laporan Kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
		2 Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan				Indeks kepuasan pelayanan yang difasilitasi dan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
		3 Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Persentase Pengolahan BMD dan Aset Lainnya yang mendukung Produktivitas Sekretariat Daerah	70%	Rp 132.607.089.000	80%	Rp 137.589.366.000	85%	Rp 145.220.815.000	90%	Rp 155.999.650.000	100%	Rp 170.354.414.000	100%	Rp 741.771.328.000	Sekretariat Daerah	Kota Makassar		
		4 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Perangkat Daerah	30%		30%		30%		30%		30%		30%					
		5 Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				Cakupan Pelayanan Kefinasan Pimpinan	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
		6 Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Peminang Urusan Pemerintah Daerah	4.01.01.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Outcome	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Rp 435.701.900	6 Dokumen	Rp 452.071.952	6 Dokumen	Rp 477.146.324	6 Dokumen	Rp 512.561.918	6 Dokumen	Rp 559.726.802	30 Dokumen	Rp 2.437.208.896	Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar	



**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Kelompok sasaran
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Rp (dalam ribu)			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7 % Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	4 01 01 2.01 01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output : Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah yang disusun		2 Dokumen	Rp 273.287.900	2 Dokumen	Rp 283.555.785	2 Dokumen	Rp 299.283.333	2 Dokumen	Rp 321.497.267	2 Dokumen	Rp 351.080.779	20 Dokumen	Rp 1.528.705.064	Kasubag, Perencanaan Dan Anggaran	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar
		8 % Teriaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	4 01 01 2.01 02	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Output : Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun		60 Dokumen	Rp 42.958.000	60 Dokumen	Rp 44.572.004	60 Dokumen	Rp 47.044.210	60 Dokumen	Rp 50.536.008	60 Dokumen	Rp 55.186.227	300 Dokumen	Rp 240.296.450	Kasubag, Perencanaan Dan Anggaran	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar
		9 % Teriaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 01 01 2.01 04	3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Output : Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun		25 Dokumen	Rp 50.138.000	25 Dokumen	Rp 52.021.769	25 Dokumen	Rp 54.907.179	25 Dokumen	Rp 58.982.597	25 Dokumen	Rp 64.410.053	125 Dokumen	Rp 280.459.598	Kasubag, Perencanaan Dan Anggaran	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar
		10 % Terfasilitasinya Keremah tanggahan Sekretariat Daerah	4 01 01 2.01 06	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		3 Dokumen	Rp 39.984.000	3 Dokumen	Rp 41.486.266	3 Dokumen	Rp 43.787.320	3 Dokumen	Rp 47.037.380	3 Dokumen	Rp 51.365.662	15 Dokumen	Rp 223.660.628	Kasubag, Perencanaan Dan Anggaran	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar
		11 Terlaksananya penataan organisasi	4 01 01 2.01 07	5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output : Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun		4 Laporan	Rp 29.334.000	4 Laporan	Rp 30.436.128	4 Laporan	Rp 32.124.281	4 Laporan	Rp 34.508.666	4 Laporan	Rp 37.684.082	20 Laporan	Rp 164.087.156	Kasubag, Perencanaan Dan Anggaran	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar
		12 Jumlah Pelayanan Fasilitas Keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar	4 01 01 2.02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Outcome : Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan		18 Dokumen	Rp 39.336.438.593	18 Dokumen	Rp 40.814.374.642	18 Dokumen	Rp 43.078.162.071	18 Dokumen	Rp 46.275.585.257	18 Dokumen	Rp 50.533.768.563	90 Dokumen	Rp 220.038.329.127	Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Kota Makassar	ASN dan Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar
			4 01 01 2.02 01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan		14 Bulan	Rp 35.383.395.593	14 Bulan	Rp 36.712.809.179	14 Bulan	Rp 38.749.101.456	14 Bulan	Rp 41.625.205.484	14 Bulan	Rp 45.455.470.496	70 Bulan	Rp 197.925.982.209	Kasubag Perbendaharaan Dan Verifikasi	Kota Makassar	ASN dan Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar
			4 01 01 2.02 02	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Output : Jumlah Bulan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan		12 Bulan	Rp 2.739.325.000	12 Bulan	Rp 2.842.246.040	12 Bulan	Rp 2.999.892.480	12 Bulan	Rp 3.222.555.781	12 Bulan	Rp 3.519.088.675	60 Bulan	Rp 15.323.107.976	Kasubag Perbendaharaan Dan Verifikasi	Kota Makassar	ASN dan Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar



**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Kelompok sasaran
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Rp (dalam ribu)			
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			4 01 01 2.02 03	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Output : % Jumlah Dokumen dan penuguan yang terverifikasi	100%	Rp 696.588.600	100%	Rp 722.760.603	100%	Rp 762.848.841	100%	Rp 819.470.351	100%	Rp 894.876.312	100%	Rp 3.896.544.708	Kasubag Perbendaharaan Dan Verifikasi	Kota Makassar	ASN dan Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar	
			4 01 01 2.02 05	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5 Laporan	Rp 59.426.000	5 Laporan	Rp 61.658.735	5 Laporan	Rp 65.078.664	5 Laporan	Rp 69.909.047	5 Laporan	Rp 76.341.932	25 Laporan	Rp 332.414.577	Kasubag Perbendaharaan Dan Verifikasi	Kota Makassar	ASN dan Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar	
			4 01 01 2.02 06	5 Pengelolan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Output : Jumlah Kegiatan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4 Kegiatan	Rp 251.734.000	4 Kegiatan	Rp 261.192.069	4 Kegiatan	Rp 275.679.203	4 Kegiatan	Rp 296.141.150	4 Kegiatan	Rp 323.391.444	20 Kegiatan	Rp 1.408.137.867	Kasubag Perbendaharaan Dan Verifikasi	Kota Makassar	ASN dan Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar	
			4 01 01 2.02 07	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Output : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang tersusun	12 Laporan	Rp 205.969.400	12 Laporan	Rp 213.708.016	12 Laporan	Rp 225.561.426	12 Laporan	Rp 242.303.444	12 Laporan	Rp 264.599.704	60 Laporan	Rp 1.152.141.900	Kasubag Perbendaharaan Dan Verifikasi	Kota Makassar	ASN dan Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar	
			4 01 01 2.03	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Outcome : % Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 2.343.422.000	100%	Rp 2.431.468.299	100%	Rp 2.566.330.769	100%	Rp 2.756.813.490	100%	Rp 3.010.489.745	100%	Rp 13.108.524.304	Kepala Bagian Umum	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar	
			4 01 01 2.03 02	1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Output : Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Laporan	Rp 929.204.000	1 Laporan	Rp 964.115.755	1 Laporan	Rp 1.017.590.863	1 Laporan	Rp 1.093.120.284	1 Laporan	Rp 1.193.706.944	5 Laporan	Rp 5.197.737.845	Kasubag Perlengkapan	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar	
			4 01 01 2.03 06	2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Output : Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	Rp 1.414.218.000	4 Dokumen	Rp 1.467.352.545	4 Dokumen	Rp 1.548.739.906	4 Dokumen	Rp 1.663.693.206	4 Dokumen	Rp 1.816.792.802	20 Dokumen	Rp 7.910.786.458	Kasubag Perlengkapan	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar	
			4 01 01 2.05	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Outcome : % Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 3.025.900.000	100%	Rp 3.139.588.144	100%	Rp 3.313.726.796	100%	Rp 3.758.967.076	100%	Rp 4.104.859.425	100%	Rp 17.343.041.441	Kepala Bagian Umum	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar	



**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Kelompok sasaran
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)					
							Rp (dalam ribu)																
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			4 01 01 2.05 02	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Output : Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut yang diadakan		2192 Stel	Rp 2.103.400.000	2192 Stel	Rp 2.182.428.270	2192 Stel	Rp 2.303.477.624	2192 Stel	Rp 2.673.733.412	2192 Stel	Rp 2.919.764.811	10960 stel	Rp 12.182.804.117	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Sekretaris Daerah, Staff Ahli dan Kepegawaian	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar		
			4 01 01 2.05 09	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Output : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi		120 Orang	Rp 922.500.000	120 Orang	Rp 957.159.874	120 Orang	Rp 1.010.249.172	120 Orang	Rp 1.085.233.664	120 Orang	Rp 1.185.094.614	600 Orang	Rp 5.160.237.324	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Sekretaris Daerah, Staff Ahli dan Kepegawaian	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar		
			4 01 01 2.06	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Outcome : % Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	Rp 9.856.842.500	100%	Rp 10.227.180.624	100%	Rp 10.794.435.742	100%	Rp 11.595.639.356	100%	Rp 12.662.646.022	100%	Rp 55.136.744.244	Kepala Bagian Umum	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar		
			4 01 01 2.06 01	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung yang diadakan		36 Jenis	Rp 1.324.200.000	36 Jenis	Rp 1.373.952.418	36 Jenis	Rp 1.450.159.299	36 Jenis	Rp 1.557.795.576	36 Jenis	Rp 1.701.140.691	180 Jenis	Rp 7.407.247.983	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Sekretaris Daerah, Staff Ahli dan Kepegawaian	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar		
			4 01 01 2.06 05	2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		30 Jenis	Rp 943.440.000	30 Jenis	Rp 978.886.625	30 Jenis	Rp 1.033.181.007	30 Jenis	Rp 1.109.867.586	30 Jenis	Rp 1.211.995.298	150 Jenis	Rp 5.277.370.516	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Sekretaris Daerah, Staff Ahli dan Kepegawaian	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar		
			4 01 01 2.06 06	3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah bahan bacaan yang disediakan		2112 Bahan Bacaan	Rp 253.440.000	2112 Bahan Bacaan	Rp 262.962.166	2112 Bahan Bacaan	Rp 277.547.480	2112 Bahan Bacaan	Rp 298.148.097	2112 Bahan Bacaan	Rp 325.583.067	10560 Bahan Bacaan	Rp 1.417.680.810	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Sekretaris Daerah, Staff Ahli dan Kepegawaian	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar		
			4 01 01 2.06 08	4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Output : Jumlah Kunjungan Tamu Pemerintah Kota Makassar yang Difasilitasi		200 Kunjungan	Rp 6.021.762.500	200 Kunjungan	Rp 6.248.010.229	200 Kunjungan	Rp 6.594.558.893	200 Kunjungan	Rp 7.084.031.853	200 Kunjungan	Rp 7.735.889.760	1000 Kunjungan	Rp 33.684.253.234	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Sekretaris Daerah, Staff Ahli dan Kepegawaian	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar		





**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Kelompok sasaran	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target				Pagu (Rp)
							Rp (dalam ribu)														
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			4 01 01 2.06 09	5. Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi S/PD	Output : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	141 Perjalanan	Rp 1.314.000.000	141 Perjalanan	Rp 1.363.369.186	141 Perjalanan	Rp 1.438.989.064	141 Perjalanan	Rp 1.545.796.244	141 Perjalanan	Rp 1.688.037.206	705 Perjalanan	Rp 7.350.191.700		Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Sekretaris Daerah, Staff Ahli dan Kepegawaian	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar
			4 01 01 2.07	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Outcome : % Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 13.217.942.919	100%	Rp 13.714.563.229	100%	Rp 11.308.851.241	100%	Rp 13.448.953.691	100%	Rp 13.410.444.722	100%	Rp 65.100.755.802		Kepala Bagian Umum	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar
			4 01 01 2.07 01	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	-	Rp -	2 Unit	Rp 3.000.000.000	-		2 Unit	Rp 3.000.000.000	-		4 Unit	Rp 6.000.000.000		Kasubag Perlengkapan	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar
			4 01 01 2.07 02	2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output : Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	Rp 7.880.000.000	100%	Rp 5.176.064.832	100%	Rp 4.463.157.568	100%	Rp 3.595.146.891	100%	Rp 3.925.964.845	100%	Rp 25.040.334.135		Kasubag Perlengkapan	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar
			4 01 01 2.07 05	3. Pengadaan Mebel	Output : Jumlah Mebeleur yang diadakan	10 jenis	Rp 1.671.400.000	10 jenis	Rp 1.734.197.305	10 jenis	Rp 1.830.385.329	10 jenis	Rp 1.966.243.411	10 jenis	Rp 3.147.173.049	50 jenis	Rp 10.349.399.093		Bagian Umum	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar
			4 01 01 2.07 06	4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	17 jenis	Rp 3.666.542.919	17 jenis	Rp 3.804.301.093	17 jenis	Rp 5.015.308.344	17 jenis	Rp 4.887.563.390	17 jenis	Rp 6.337.306.828	85 jenis	Rp 22.711.022.574		Bagian Umum	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar
			4 01 01 2.08	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Outcome : % Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 17.164.197.032	100%	Rp 17.809.084.736	100%	Rp 19.796.873.535	100%	Rp 20.766.271.936	100%	Rp 22.677.141.177	100%	Rp 98.213.568.416		Kepala Bagian Umum	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar
			4 01 01 2.08 01	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah surat masuk dan surat keluar yang tersedia	10500 Surat	Rp 5.618.904.000	10500 Surat	Rp 5.830.015.658	10500 Surat	Rp 6.153.380.068	10500 Surat	Rp 6.610.107.076	10500 Surat	Rp 7.218.355.410	52500 Surat	Rp 31.430.762.212		Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Sekretaris Daerah, Staff Ahli dan Kepegawaian	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar



**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Kelompok sasaran
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Rp (dalam ribu)			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			4 01 01 2.08 02	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah penyediaan kebutuhan jasa telepon, air dan listrik		12 Bulan	Rp 3.999.907.032	12 Bulan	Rp 4.150.190.256	12 Bulan	Rp 4.380.382.483	12 Bulan	Rp 4.705.510.857	12 Bulan	Rp 5.138.502.199	60 Bulan	Rp 22.374.492.747	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Sekretaris Daerah, Staff Ahli dan Kepegawaian	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar
			4 01 01 2.08 03	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		10 Jenis	Rp 6.355.410.000	10 jenis	Rp 6.594.193.425	10 jenis	Rp 7.959.943.294	10 jenis	Rp 8.050.760.219	10 jenis	Rp 8.791.574.465	50 Jenis	Rp 37.751.881.404	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Sekretaris Daerah, Staff Ahli dan Kepegawaian	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar
			4 01 01 2.08 04	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output : Jumlah tenaga kebersihan yang terlihat dalam kebersihan kantor		300 Orang	Rp 1.189.976.000	300 Orang	Rp 1.234.685.396	300 Orang	Rp 1.303.167.771	300 Orang	Rp 1.399.893.783	300 Orang	Rp 1.528.709.104	1500 Orang	Rp 6.656.432.054	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Sekretaris Daerah, Staff Ahli dan Kepegawaian	Kota Makassar	Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar
			4 01 01 2.09	8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Outcome : % Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	Rp 11.096.323.450	100%	Rp 11.513.230.954	100%	Rp 12.151.817.426	100%	Rp 13.053.771.013	100%	Rp 15.531.005.700	100%	Rp 63.346.148.543	Kepala Bagian Umum	Kota Makassar	Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Kota Makassar
			4 01 01 2.09 01	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang pajaknya dipanjang dan dipelihara		10 Unit	Rp 870.265.600	10 Unit	Rp 902.962.940	10 Unit	Rp 953.046.181	10 Unit	Rp 1.023.784.852	10 Unit	Rp 1.117.991.409	50 Unit	Rp 4.868.050.982	Kasubag Perencanaan	Kota Makassar	Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Kota Makassar
			4 01 01 2.09 02	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang pajaknya dibayar dan dipelihara		439 Unit	Rp 6.147.606.650	439 Unit	Rp 6.378.582.555	439 Unit	Rp 6.732.373.471	439 Unit	Rp 7.232.075.547	439 Unit	Rp 7.897.556.128	2195 Unit	Rp 34.388.194.351	Kasubag Perencanaan	Kota Makassar	Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Kota Makassar
			4 01 01 2.09 05	3. Pemeliharaan Mebel	Output : Jumlah mebel/uer yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala		3 Gedung Kantor	Rp 50.000.000	3 Gedung Kantor	Rp 51.878.584	3 Gedung Kantor	Rp 54.756.053	3 Gedung Kantor	Rp 58.820.253	3 Gedung Kantor	Rp 64.232.770	15 Gedung Kantor	Rp 279.687.660	Kasubag Perencanaan	Kota Makassar	Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Kota Makassar
			4 01 01 2.09 06	4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah Bangunan/Gedung yang peralatan dan mesinnya mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala		6 Bangunan/Gedung	Rp 1.009.379.200	6 Bangunan/Gedung	Rp 1.047.303.271	6 Bangunan/Gedung	Rp 1.105.392.413	6 Bangunan/Gedung	Rp 1.187.438.795	6 Bangunan/Gedung	Rp 2.072.758.221	30 Bangunan/Gedung	Rp 6.422.271.900	Kasubag Perencanaan	Kota Makassar	Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Kota Makassar



**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Kelompok sasaran
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Rp (dalam ribu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4 01 01 2.09 09	5.	Penyiapan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	6	Rp 3.019.072.000	6	Rp 3.132.503.604	6	Rp 3.306.249.309	6	Rp 3.551.651.566	6	Rp 4.378.467.171	30	Rp 17.387.943.651	Kasubag Perencanaan	Kota Makassar	Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Kota Makassar
		4 01 01 2.11	9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Outcome	% Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	Rp 3.455.550.000	100%	Rp 3.585.380.816	100%	Rp 3.784.245.556	100%	Rp 4.065.126.492	100%	Rp 4.439.190.995	100%	Rp 19.329.493.859	Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Kota Makassar	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
		4 01 01 2.11 01	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Output	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 Bulan	Rp 175.550.000	12 Bulan	Rp 182.145.708	12 Bulan	Rp 192.248.501	12 Bulan	Rp 206.517.908	12 Bulan	Rp 225.521.257	60 Bulan	Rp 981.983.374	Kasubag Abmansi Dan Pelaporan	Kota Makassar	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
		4 01 01 2.11 03	2.	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Output	Jumlah pimpinan dan keluarga yang mendapatkan jasa perawatan kesehatan (Medical Check Up)	8 Orang	Rp 80.000.000	8 Orang	Rp 83.005.734	8 Orang	Rp 87.609.684	8 Orang	Rp 94.112.405	8 Orang	Rp 102.772.433	40 Orang	Rp 447.500.256	Kasubag Abmansi Dan Pelaporan	Kota Makassar	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
		4 01 01 2.11 04	3.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Output	Jumlah bulan penyediaan dana penunjang operasional Kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 Bulan	Rp 3.200.000.000	12 Bulan	Rp 3.320.229.373	12 Bulan	Rp 3.504.387.371	12 Bulan	Rp 3.764.496.180	12 Bulan	Rp 4.110.897.305	60 Bulan	Rp 17.900.010.229	Kasubag Abmansi Dan Pelaporan	Kota Makassar	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
		4 01 01 2.12	10	Facilitas Kermahatngan Sekretariat Daerah	Outcome	% Terfungsinya Kermahatngan Sekretariat Daerah	100%	Rp 7.148.266.956	100%	Rp 7.416.839.348	100%	Rp 9.994.613.972	100%	Rp 9.736.451.806	100%	Rp 10.632.379.893	100%	Rp 44.928.551.976	Kepala Bagian Umum	Kota Makassar	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah
		4 01 01 2.12 01	1.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Output	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1 Rumah Jabatan	Rp 4.792.109.825	1 Rumah Jabatan	Rp 4.972.157.438	1 Rumah Jabatan	Rp 5.247.940.360	1 Rumah Jabatan	Rp 5.637.462.228	1 Rumah Jabatan	Rp 6.156.209.802	5 Rumah Jabatan	Rp 26.805.879.653	Kasubag Rumah Tangga	Kota Makassar	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah
		4 01 01 2.12 02	2.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Output	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1 Rumah Jabatan	Rp 1.542.544.250	1 Rumah Jabatan	Rp 1.600.500.228	1 Rumah Jabatan	Rp 2.689.272.604	1 Rumah Jabatan	Rp 2.388.880.616	1 Rumah Jabatan	Rp 2.608.700.452	5 Rumah Jabatan	Rp 10.829.898.229	Kasubag Rumah Tangga	Kota Makassar	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah
		4 01 01 2.12 03	3.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Output	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1 Rumah Dinas	Rp 813.612.881	1 Rumah Dinas	Rp 844.181.683	1 Rumah Dinas	Rp 2.057.400.928	1 Rumah Dinas	Rp 1.710.108.962	1 Rumah Dinas	Rp 1.867.469.639	5 Rumah Dinas	Rp 7.292.774.094	Kasubag Rumah Tangga	Kota Makassar	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah
		4 01 01 2.13	11	Penataan Organisasi	Outcome	Terlaksananya penataan organisasi	100%	Rp 2.175.211.800	100%	Rp 2.256.938.160	100%	Rp 2.382.120.238	100%	Rp 2.558.930.160	100%	Rp 2.794.397.602	100%	Rp 12.167.597.960	Bagian Organisasi	Kota Makassar	Perangkat Daerah



**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Kelompok sasaran
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Rp (dalam ribu)			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			4 01 01 2.13 01	1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Output : Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan yang dilaksanakan		5 Dokumen	Rp 501.725.400	5 Dokumen	Rp 520.576.066	5 Dokumen	Rp 549.450.449	5 Dokumen	Rp 590.232.297	5 Dokumen	Rp 644.544.248	25 Dokumen	Rp 2.806.528.060	Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Makassar	Perangkat Daerah
			4 01 01 2.13 02	2. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Output : Jumlah dokumen fasilitas pelayanan publik dan tata laksana yang dilaksanakan		5 Dokumen	Rp 1.169.191.200	5 Dokumen	Rp 1.213.119.677	5 Dokumen	Rp 1.280.405.899	5 Dokumen	Rp 1.375.442.439	5 Dokumen	Rp 1.502.007.798	25 Dokumen	Rp 6.540.167.013	Subbagian Tataaksana dan Pelayanan Publik	Kota Makassar	Perangkat Daerah
			4 01 01 2.13 03	3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Output : Jumlah dokumen peringatan kinerja dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan		2 Dokumen	Rp 504.295.200	2 Dokumen	Rp 523.242.417	2 Dokumen	Rp 552.264.291	2 Dokumen	Rp 593.255.423	2 Dokumen	Rp 647.845.556	10 Dokumen	Rp 2.820.902.887	Subbagian Reformasi Birokrasi dan Kinerja	Kota Makassar	Perangkat Daerah
			4 01 01 2.14 12	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Outcome : Jumlah Pelayanan, Fasilitas Keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar		1160 Pelayanan	Rp 23.351.291.850	1160 Pelayanan	Rp 24.228.639.095	1160 Pelayanan	Rp 25.572.491.330	1160 Pelayanan	Rp 27.470.577.803	1160 Pelayanan	Rp 29.998.363.355	5800 Pelayanan	Rp 130.621.363.433	Bagian Protokol Kota Makassar	Kota Makassar	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah
			4 01 01 2.14 01	1. Fasilitas Keprotokoleran	Output : Jumlah pelayanan fasilitas Keprotokoleran Pemerintah Kota Makassar yang mendapat layanan keprotokoleran		840 Pelayanan	Rp 10.491.044.250	840 Pelayanan	Rp 10.885.210.398	840 Pelayanan	Rp 11.488.963.431	840 Pelayanan	Rp 12.341.717.502	840 Pelayanan	Rp 13.477.376.730	4200 Pelayanan	Rp 58.684.312.310	Sub Bagian Akomodasi & Perjalanan Dinas	Kota Makassar	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah
			4 01 01 2.14 02	2. Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Output : Jumlah Fasilitas Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan		320 Pelayanan	Rp 432.351.800	320 Pelayanan	Rp 448.595.983	320 Pelayanan	Rp 473.477.559	320 Pelayanan	Rp 508.620.844	320 Pelayanan	Rp 555.423.078	1600 Pelayanan	Rp 2.418.469.263	Sub Bagian Pengaturan Acara	Kota Makassar	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah
			4 01 01 2.14 03	3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Output : Jumlah Pendokumentasian Kegiatan/Tugas Pimpinan Daerah yang dilaksanakan		240 Dokumen	Rp 12.427.895.900	240 Dokumen	Rp 12.894.832.713	240 Dokumen	Rp 13.610.050.341	240 Dokumen	Rp 14.620.239.458	240 Dokumen	Rp 15.965.563.547	1200 Dokumen	Rp 69.518.581.860	Sub Bagian Komunikasi & Dokumentasi Pimpinan	Kota Makassar	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah
<b>JUMLAH</b>								Rp 178.088.932.000		Rp 184.780.024.000		Rp 195.028.930.000		Rp 209.504.703.000		Rp 228.782.884.000		Rp 996.185.473.000			



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini membahas mengenai kesesuaian, sinergitas serta sinkronisasi antara program dan kegiatan yang telah dirancang oleh unit kerja lingkup Sekretariat Kota Makassar dengan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021 – 2026. Tititik berat pada bagian ini adalah indikator kinerja Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Kota Makassar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator ini juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Makassar yang merupakan ukuran keberhasilan yang dilaksanakan oleh masing – masing Bagian.

Untuk mendapatkan gambaran atas rumusan lengkap tujuan, sasaran dan indikator sasaran Sekretariat Daerah Kota Makassar yang masuk dalam penetapan Indikator Kinerja Utama maka digambarkan pada table dibawah ini:

**Tabel 14**  
**Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja pada Tahun ke -					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)	10 Besar Nasional	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Terlaksananya Kegiatan dan Evaluasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat	50%	27 Kegiatan	27 Kegiatan	27 Kegiatan	27 Kegiatan	27 Kegiatan	135 Kegiatan
3	% Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	% Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri	56%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	% Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Jumlah BUMD yang berkinerja baik	83,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	% Penyerapan Realisasi Anggaran melalui SISMONTPEPRA	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%
7	Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	-	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level
8	Terselenggaranya Kegiatan-kegiatan Kelembagaan kemasyarakatan di 153 Kelurahan di Kota Makassar	-	153 Kelurahan	153 Kelurahan	153 Kelurahan	153 Kelurahan	153 Kelurahan	153 Kelurahan



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021 - 2026 disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengacu kepada RPJMD Kota Makassar Tahun 2021 - 2026.

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021 -2026 ini diharapkan mampu menentukan arah dan kebijakan dalam mengemban sebagian tugas pemerintahan. Untuk selanjutnya Renstra ini akan difungsikan sebagai acuan dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan pada tiap-tiap Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Revisi atas Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021 - 2026 tidak menutup kemungkinan terjadi dikemudian hari dan mengalami penyempurnaan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada dalam Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Semoga Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan ini dapat terwujud sesuai dengan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Makassar, 28 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**



**Ir.M.Ansar, MSi**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19630517 199203 1 004